



Laporan Tahunan

FITRA PROVINSI RIAU

PERJALANAN ADVOKASI

ANGGARAN DAERAH 2022

Daftar Isi

1	Daftar Isi	5	Profil Badan Pengurus
2	Kata Pengantar Merawat Eksistensi	5	Profil Badan Pembina/Pengawas
3	Statistik Fitra Riau	9	Sekilas Fitra Riau Visi dan misi
4	Struktur Organisasi	10	Kode Etik Fitra Riau
		11	Aktifitas Fitra Riau
BAB I <hr/>			
13	AGENDA UTAMA FITRA RIAU	26	Kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Siak Hijau
14	Agenda Transformasi Kelembagaan	27	Kajian Menggagas BPD LH Daerah
19	Agenda Riset dan Advokasi	28	Kajian Dampak Kebijakan ADD berbasis Migas di Pelalawan
BAB II <hr/>		29	Mendorong Kebijakan TAPE Riau Hijau Riset Penilaian Indeks
20	PROGRAM DAN PENCAPAIAN FITRA RIAU TAHUN 2022	30	Keterbukaan Informasi Publik Anggaran di Riau
21	Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Pelalawan		
22	Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Indragiri Hulu	BAB III <hr/>	
23	Pengembangan Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Bengkalis	21	PUBLIKASI FITRA RIAU TAHUN 2022
24	Penguatan Kapasitas Pemerintah Kampung/Desa Dalam meningkatkan Kinerja Ekologi Desa;	37	KONTEN YOUTUBE FITRA RIAU SEBAGAI PUSAT PENGETAHUAN ANGGARAN
25	Pendampingan Keberlanjutan dan Pengembangan Kebijakan TAKE Siak Hijau	40	FITRA RIAU DALAM MEDIA

Pengantar

Merawat Eksistensi Fitra Riau 2022



Triono Hadi

Koordinator Fitra Riau

Salam Transparansi!!

Tahun 2022 telah berlalu, ada capaian juga hambatan bagi organisasi Perkumpulan Fitra Riau dalam menjalankan agendanya serta perjuangannya menuju wujud organisasi ideal. Untuk melihat bagaimana perjalanan Fitra Riau dalam agenda advokasi anggaran daerah tahun tersebut, maka kami perlu menyusun laporan tahunan 2022 sebagai bentuk pertanggung-jawaban kami kepada publik dan mitra kerja kami dimanapun berada. Laporan tahunan ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami terhadap publik dan mitra-mitra kerja kami terhadap program-program dan keuangan yang kami jalankan. Tentu kami berharap, dapat meningkatkan kepercayaan semua stakeholder dan terus mendukung terhadap kerja-kerja kami kedepan.

Tahun 2022, kami masih menyebutnya sebagai tahun merawat eksistensi, sebagai keberlanjutan dari kerja-kerja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sembari terus berupaya untuk memperkuat rekognisi terhadap kerja-kerja Fitra Riau. Merawat eksistensi sebagai organisasi riset dan advokasi tahun 2022 kami dapat katakan berhasil, ditandai dengan tonggak penanda baik dalam konteks internal maupun eksternal.

Dalam konteks internal, keberhasilan merawat eksistensi Fitra Riau ditandai dengan (1) Perkumpulan Fitra Riau secara konsisten melaksanakan mandat organisasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi sebagai langkah konsolidasi antar struktur organisasi (badan pengurus, badan pengawas/badan pembina). (2) Memperkuat struktur badan pengawas dan pengurus melalui hasil Rapat Anggota Perkumpulan diakhir tahun 2021. (3) Konsisten menerbitkan publikasi dari hasil kajian-kajian dalam bentuk policy brief, factsheet, dan info grafis, serta publikasi pengetahuan melalui platform youtube. (4) Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan donor untuk mensupport pendanaan program-program organisasi baik untuk tahun 2022 maupun tahun berikutnya. (5) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan organisasi, (6) Meningkatkan salary dan benefit staff badan pengurus, (7) Berhasil menginisiasi pendanaan alternatif organisasi melalui pelatihan berbayar digitalisasi desa.

Dalam konteks eksternal, tahun 2022 Fitra Riau berhasil memperluas jaringan dan mitra kerja Fitra Riau bersama pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta jaringan masyarakat sipil. Ditandari dengan beberapa hal, Fitra Riau mendapatkan kepercayaan (rekognisi) dari perguruan tinggi Universitas Lancang Kuning dan Universitas Andalas untuk program magang mahasiswa. Rekognisi pengetahuan oleh pemerintah, lembaga donor, dan mitra CSO dari buah kerja-kerja Fitra Riau yang dihasilkan dalam tahun 2022 dan tahun sebelumnya. Seperti Green Budget Tagging, pengembangan EFT, perencanaan pembangunan desa responsif ekologi, penyusunan regulasi Desa, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Masih dalam konteks eksternal, meningkatnya kepercayaan mitra-mitra CSO terhadap kapasitas yang dimiliki tim Fitra Riau. Hal itu ditandai dengan keterlibatan Fitra Riau baik secara kelembagaan maupun personil tim Fitra Riau dalam studi-studi yang dilaksanakan oleh mitra CSO baik skala lokal maupun Nasional, agenda penguatan kapasitas, resource person diskusi baik lokal maupun Nasional. Pada sisi lainnya, peningkatan pengakuan terhadap Fitra Riau juga semakin meningkat oleh pemerintah daerah khususnya, ditandai dengan keterlibatannya Fitra Riau baik secara kelembagaan maupun personil tim dalam tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk tujuan khusus. Seperti tim Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Siak, Tim Sekretariat Siak Hijau di Kabupaten Siak, Tim Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau.

Dalam agenda Riset dan Advokasi tahun 2022 Fitra Riau juga berhasil mendorong inisiatif kebijakan khususnya dalam konteks anggaran Lingkungan Hidup. Seperti memperluas implementasi kebijakan EFT (TAPE/TAKE) di pemerintah daerah di Provinsi Riau. Perluasan jaringan kerja Fitra Riau ditingkat Desa, terhadap lebih dari 200 Desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui program penguatan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa. Fitra Riau juga terus aktif menjadi rujukan media dalam pemberitaan seputar kebijakan anggaran, transparansi dan anti korupsi.

Tentu, keberhasilan dari kerja-kerja Fitra Riau tahun 2022 merupakan buah dari kerja keras tim Fitra Riau, serta kontribusi besar dari badan pengawas dan Pembina Fitra Riau untuk memastikan Fitra Riau tetap produktif dan bermanfaat. Sebagai koordinator, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh personil badan pengurus Fitra Riau yang telah bekerja keras dan solid dalam menjalankan agenda-agenda Fitra Riau. Terimakasih yang tidak terhingga juga kepada badan pengawas dan Pembina Fitra Riau yang terus membersamai. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada CLUA, The Asia Foundation, yang terus mempercayai Fitra Riau sebagai mitra kerjasama. Begitu juga kepada Seknas Fitra, PWYP, Pattiro, dan mitra kerja lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu baik nasional dan mitra CSO di daerah atas dukungan dan kerjasama kepada Fitra Riau hingga saat ini.

Fitra Riau terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja-kerja organisasi yang berkontribusi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kebijakan anggaran yang proporsional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik kedepan. Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kemajuan kelembagaan Fitra Riau selanjutnya. Laporan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas guna memberikan informasi secara ringkas agenda-agenda kerja Fitra Riau dan capaian-capaian yang dihasilkan sepanjang tahun 2022. **Selamat membaca!!**

Pekanbaru, Mei 2023

Triono Hadi
Koordinator Fitra Riau

Statistik FITRA RIAU

Media dan Publikasi

- 2 Buku
- 8 Policy Brief
- 3 Factsheet
- 4 Press Rilis
- 4 Infografis
- 60 Media Coverage
- 17 Youtube



Anggaran yang di Kelola

Pendapatan

Rp.2.098.577.820

Pengeluaran

Rp.2.002.062.640

Lebih dari
56 Kegiatan



SDM Fitra Riau

Badan Pengawas

2022 : Laki-Laki: 4 Orang
Perempuan: 1 Orang

Badan Pengurus

2022 : Laki-Laki: 4 Orang
Perempuan: 4 Orang



Total Pengunjung Website

23.939 Visitor



Media Sosial FITRA RIAU

Followers 2.400
Total Posting



Followers 614
Post 137



Followers 1.105
tweet 1.889

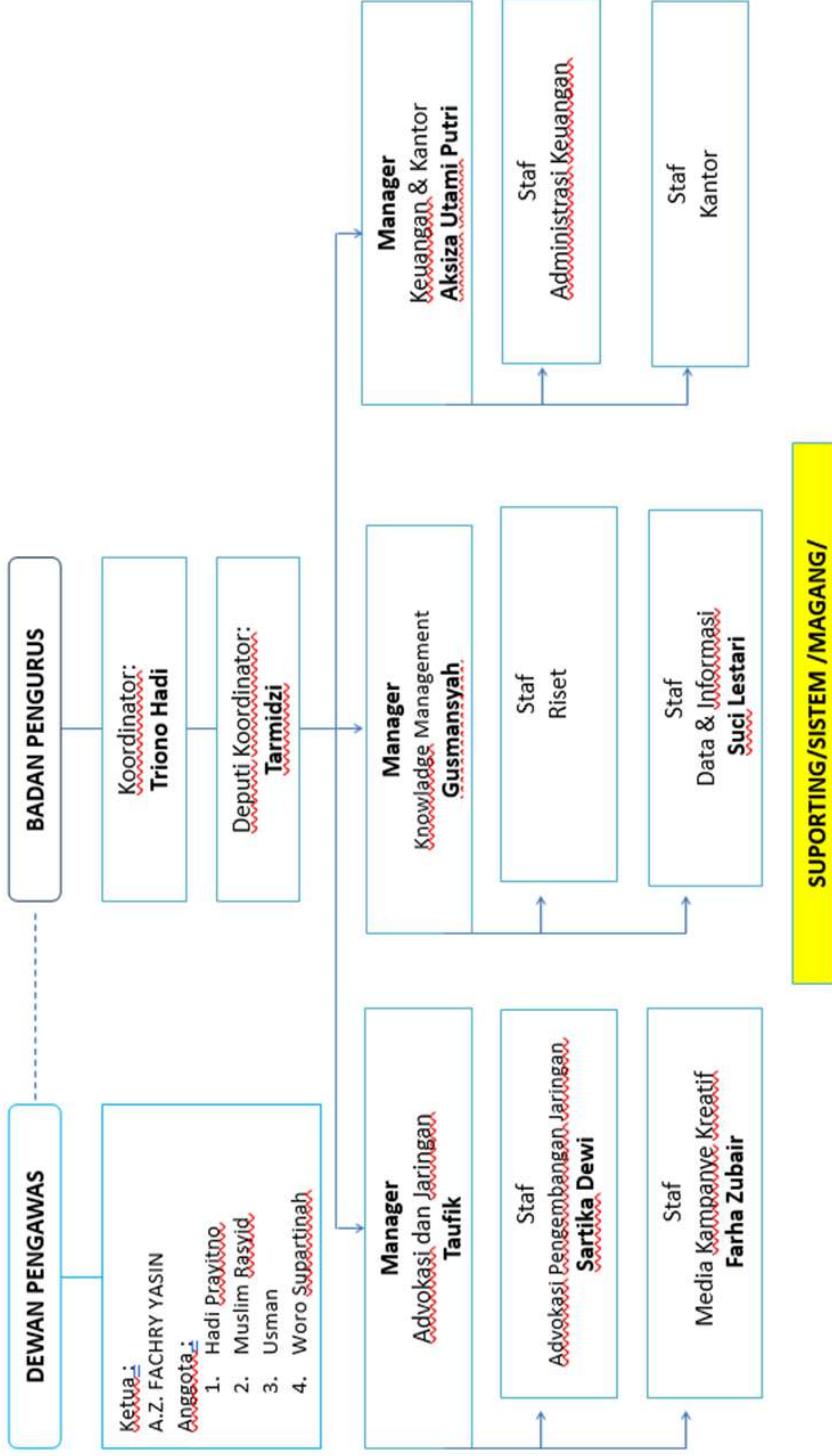


Followers 451
79 Video



Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR BADAN PENGURUS PERKUMPULAN FITRA RIAU 2022-2024



PROFIL PERSONIL

Badan Pengurus

Fitra Riau 2021-2024

Triono Hadi, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Suska Riau. Bergabung di Fitra Riau sejak tahun 2011 hingga sekarang, dengan posisi saat ini sebagai Koordinator Perkumpulan Fitra Riau 2018-2021, melanjutkan kepemimpinan selanjutnya ditetapkan melalui musyawarah anggota perkumpulan luar biasa (RAPELUSA) pada 15 Agustus 2018. Memiliki 10 tahun pengalaman advokasi dan technical assistensi kebijakan anggaran daerah, kebijakan publik dan anti korupsi. Berpengalaman sebagai konsultan big data analisis di Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Memimpin pelaksanaan program (program director) di beberapa program kerjasama dengan lembaga TAF dan CLUA. Expert dibidang perencanaan penganggaran responsif gender, Kebijakan Ecological Fiscal Transfer, Budget Tagging Analisis, pendampingan Keterbukaan Informasi Publik.



Triono Hadi
Koordinator

Tarmidzi, bergabung di Fitra Riau sejak tahun 2013 mulai sebagai staff data dan informasi hingga saat ini di percaya sebagai Deputi Koordinator. Dalam perjalanannya kurang lebih 10 tahun di Fitra Riau, ia terus mengembangkan skill dan knowledge sampai menjadikannya sebagai ahli atau analis khusus dibidang kebijakan anggaran sektor lingkungan hidup. Untuk menunjang kepakarannya, selama di Fitra Riau ia melanjutkan pendidikannya hingga berhasil meraih magister hukum (S2) di pasca sarjana UIR tahun 2021.



Tarmidzi
Deputi Koordinator

Aksiza Utami Putri S.IP lahir di Peranap , 05 Oktober 1996 pendidik terakhir Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau. Bergabung di fitra Riau sejak tahun 2018 menjadi voluntary. Pada tahun 2020 sebagai Staff data dan informasi. Fokus pada pengelolaan data anggaran Daerah. posisi saat ini sebagai manager Keuangan di Perkumpulan Fitra Riau 2022



Aksiza Utami Putri
Manager Keuangan

Badan Pengurus Fitra Riau 2021-2024

Lahir di Duri, 25 Maret 1994, pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Fisipol, Universitas Islam Riau, Pekerjaan di Fitra Provinsi Riau dimulai pada oktober 2015 dari posisi Volunteer, pada 2016 menjadi staf biasa dan pada 2017 posisi sebagai staf advokasi dan 2019 diposisikan sebagai Manajer Advokasi dan jaringan Fitra Riau. Sejak maret 2016-2020 di percaya dalam memegang beberapa program donor dimulai dari Asisten Program sampai Program Officer di The Asian Foundation (TAF) dan dilanjutkan di 2019-2022 sebagai Program Asisten di Climate Land Use Alliance (CLUA) dan 2023-2024 bertanggung jawab dalam program officer Ford Foundation. Spesialis dalam masalah transparansi kebijakan publik, kebijakan anggaran dan telah berhasil dengan Fitra Riau mendorong berbagai produk kebijakan baik di tingkat pemerintah daerah dan komisi informasi di provinsi Riau. Bersama dengan Fitra Riau, dan Mitra Jaringan salah satunya bersama dengan Transparansi Internasional, Media Link, Seknas Fitra, Penabulu Foundation, AIPJ. dan GIZ juga telah menulis dan menerbitkan beberapa buku sebagai referensi advokasi dorongan kebijakan publik untuk pemerintah baik di skala nasional maupun pemerintah daerah. Buku yang pernah di terbitkan adalah Panduan Uji Konsekuensi dan Penyusunan Informasi Publik, terbit tahun 2019, modul panduan monitoring pemantauan pengadaan vaksin dan logistik pendukung program vaksinasi covid-19. Terbit 2020. Buku Laporan Analisis Konferensi Pengetasan Kemiskinan di Lima Daerah, terbit 2021 dan menerbitkan beberapa buku hasil riset dan kajian lainnya. Selain itu saat ini juga aktif dan berpengalaman dalam mendampingi Pemerintah Daerah dalam isu Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Anggaran Publik dan berhasil mendorong inisiatif daerah dalam kebijakan insentif kinerja berbasis ekologi transfer melalui skema Pemanfaatan Sisa DBH-DR.



Taufik
Manager
Advokasi & Jaringan

Gusmansyah, S.IP.M.IP: Lahir di Batu Gajah, 02 Agustus 1994, pendidikan terakhir Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau, Berkiprah di Fitra Riau sejak tahun 2016, Sebagai Voluntary, pada tahun 2017 posisi sebagai staf riset Fitra Riau dan saat ini diposisikan sebagai Manager Knowledge Management. Spesialis pada isu kebijakan daerah, konsen melakukan penguatan aparatur pemerintahan desa, seperti perangkat desa dan juga penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa (BPD), bersama fitra Riau menghasilkan produk kajian dan policy brief.



Gusmansyah
Manager
Knowledge Management

Badan Pengurus Fitra Riau 2021-2024



Suci Lestari Putri

Staff Data dan Publikasi

Suci Lestari Putri, Lahir di Pekanbaru, 31 oktober 1993, pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Islam Riau, Pekerjaan di Fitra Provinsi Riau dimulai pada tahun 2014 sampai sekarang. Pada 2017 posisi sebagai staf sub divisi data dan riset. Tahun 2017 - 2020 dipercaya sebagai Asisten Peneliti Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Peningkatan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Gambut Berbasis Satuan Hidrologi Gambut - Program ICCTF Konsorsium YMI dan Fitra Riau. 2021 Menulis Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Narasumber kegiatan Diskusi Publik, "Mengapa Sulit Membuka Informasi Anggaran Daerah. Tahun 2021 - 2023 tetap masih dipercaya dalam memegang sub divisi data dan edukasi Fitra Riau.



Sartika Dewi

Staff Pengembangan Jaringan

Sartika Dewi, lahir di Bengkalis tepatnya di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis, Bergabung dan menjadi anggota Fitra Riau sejak Tahun 2016 hingga sekarang, saat ini sebagai staff pengembangan jaringan Fitra Riau. Pengalaman yang dimiliki. Sebagai tim audit sosial (kerja sama KPK-GIZ), Konsultan Sosialisasi Aplikasi JAGA (KPK-GIZ), Penulis Policy Brief " Potret Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Riau", Penggagas Kelas Anggaran Perempuan Fitra Riau, Program Office Project TAF-CLUA-EFT JA. Sebagai Gender Vokal Point yang dilatih dan didampingi oleh The Asia Foundation, Penulis policy Brief "peluang pengembangan kebijakan TAKE Kabupaten Pelalawan" Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022.



Farha Zubair

Staff Media Kampanye

Farha Zubair, Lahir di Benteng 28 Februari 1995. Pendidikan Terakhir S1 Ekonomi Syariah di Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim II. Bergabung di Fitra Riau sejak Tahun 2018 Sebagai Voluntary pada tahun 2020 Posisi sebagai Staff Kampanye. Fokus pada Desain Grafis dan Publikasi media Sosial Fitra Riau.

PEMBINA/PENGAWAS

Fitra Riau 2021-2024



A.Z. Fachri Yasin

Ketua

A.Z. Fachri Yasin, menjadi anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau ditetapkan pada RAPEL pada tahun 2017, yang pernah sebagai Koordinator Fitra Riau (2005-2006). Beliau berstatus pensiun dosen Faperta UNRI (2005) yang mendalami tentang Agribisnis sebagai sistem dan bidang sosial ekonomi perdesaan. Kini sebagai dosen pengampu di Faperta UIR. Pernah sebagai Dekan Faperta UIR dan UNRI. Waktu berjalan diamanahkan sebagai anggota KPU Kota Pekanbaru (2009-2013), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau (2019-2022) dan Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Riau (2019-2024).



Muslim Rasyid

Anggota

Muslim Rasyid, adalah Ketua Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau ditetapkan pada RAPEL pada tahun 2017. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang di kedeputusan III Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Sebelumnya beliau active dalam dunia organisasi masyarakat sipil, sebagai direktur Yayasan Mitra Insani, Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dengan berbagai pengalaman baik program, pendampingan, dan advokasi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Usman

Anggota

Usman, menjadi anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau ditetapkan pada RAPELUSA pada tahun 2018. Beliau merupakan Koordinator Fitra Riau sejak 2011 – 2018, merupakan tokoh paling berkontribusi besar dalam perjalanan panjang Perkumpulan Fitra Riau. Ketekunan, kesabaran serta kerja kerasnya berhasil mengembalikan dan merawat eksistensi hingga saat ini. Memiliki keahlian dan pengalaman diberbagai isu. Demokrasi, Pemilu, Keterbukaan Informasi Publik dan Anti Korupsi. Saat ini Usman menjabat sebagai Anggota Bawaslu kabupaten Bengkalis Periode 2018-2023.



Hadi Prayitno

Anggota

Hadi Prayitno, ditetapkan sebagai anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau sejak tahun 2017 hingga sekarang. Saat ini ia bekerja sebagai Stakeholder Engagement Manager di Wildlife Works. Hadi Prayitno memiliki pengalaman kerja lebih dari 21 tahun baik pada organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, dan instansi pemerintah. Kepakarannya mencakup kebijakan anggaran negara, desentralisasi, pembangunan desa, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola hutan dan lahan, serta peningkatan kapasitas. Ia pernah bekerja di SEKNAS FITRA, The Asia Foundation, Cardno International (MAHKOTA/SLRT), Tetra Tech International (USAID LESTARI), Abt Associates (KOMPAK), FHI 360 (USAID MADANI), Tenaga Ahli Utama Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, serta Asisten Staf Khusus Presiden bidang ekonomi dan desa



Woro Supartinah

Anggota

Woro Supartinah, menjadi anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau sejak tahun 2021, ditetapkan melalui Rapat Anggota Perkumpulan (RAPEL) 2021. Saat ini juga menjadi Direktur Lembaga Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM); sebuah lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, dan perempuan, juga lingkungan. Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Jaringan Kertas Internasional (Environment Paper Network) 2015 - 2020, dan Koordinator Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) 2015 – 2018. Memiliki pengalaman mendalam dalam isu advokasi hutan, konflik sosial: kampanye dan pendampingan masyarakat terdampak; pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi masyarakat.



Sekilas Fitra Riau

Fitra Riau merupakan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Riau, Indonesia. Berdiri sejak tahun 2004, yang teregister sebagai perkumpulan pada tahun 2012 dengan nama Perkumpulan Fitra Provinsi Riau dengan register Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) AHU 007673.AH.02.01.2017 dan telah diperbaharui menjadi AHU 0000696.AH.01.08.2018. Fitra Riau dialamatkan oleh para pendirinya untuk mengawal pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di Indonesia serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, kiprah Fitra Riau juga memberdayakan masyarakat agar mereka mampu memainkan peran yang kuat dan signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan anggaran publik dengan berpihak pada masyarakat miskin, proporsional, transparan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik yang terbebas dari praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Tiga isu utama yang diperankan Fitra Riau sejalan dengan masalah yang dihadapi di daerah khususnya di Riau. yaitu:

- Mempromosikan **transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan anggaran public.**
- Mempromosikan **kebijakan anggaran daerah yang baik, proporsional dan pro Poor**
- **Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Layanan Publik.**



Visi

“Menjadi Lembaga kajian dan advokasi yang terpercaya untuk terciptanya tata kelola kebijakan anggaran berpihak kepada rakyat”



Misi

- Mewujudkan kebijakan anggaran negara yang berbasis pada kebutuhan rakyat dan terbebas dari korupsi;
- Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dan kebijakan anggaran;
- Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, perempuan, anak, kelompok marginal dan lingkungan hidup;
- Menjadikan FITRA Riau sebagai acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran dari tingkat desa, daerah dan nasional;

Kode Etik Fitra Riau

Dalam melaksanakan gerakannya Fitra Riau diupayakan dengan didasarkan atas nilai-nilai fundamental yaitu; (1) Independen, merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun pinjaman luar negeri; (2) Integritas, adalah pengejawantahan dari spirit organisasi

untuk menjaga keutuhan antara apa dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota organisasi yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab. Sementara nilai-nilai yang mendasari dalam setiap tindakan organisasi adalah sebagai berikut:

Transparansi

(Internal) Manajemen organisasi dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh staf dan komponen Fitra Riau. (eksternal) FITRA Riau sebagai badan publik, dalam melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya selalu menyediakan informasi yang cukup dan membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai dengan status FITRA dan ketentuan perundangan

Kemandirian

Merdeka dalam bertindak dan pengambilan keputusan organisasi;

Kesetaraan

Perlakuan setara kepada setiap orang;

Anti Kekerasan

Tidak mempraktekkan atau menggunakan dan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis;

Kesukarelawan

Ikhlas berbuat lebih dari tuntutan tanggungjawabnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama

Akuntabilitas

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi input, output, dan outcome kepada internal management, dewan nasional, anggota FITRA, lembaga donor, dan publik secara luas berdasarkan rencana strategis, SOP, peraturan perundangan yang berlaku dan moral. Dan tidak ada kompromi bagi staf dan anggota FITRA yang terbukti melakukan korupsi;

Partisipatif

Terbuka untuk keterlibatan berbagai komponen internal organisasi dan kelompok lain dalam pengambilan keputusan-keputusan penting.

Profesionalisme

Bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, cakap dalam bidangnya dan dapat dipercaya

Efektivitas dan Efisien:

Hemat dalam pemanfaatan sumberdaya untuk menghasilkan output yang maksimal. Menggunakan sumberdaya yang tersedia untuk hasil yang tepat sasaran dan memiliki manfaat yang maksimal bagi organisasi dan hajat hidup orang banyak;

Aktivitas FITRA RIAU Tahun 2022

1. Rapat Anggota Perkumpulan (RAPEL) ke 2 Perkumpulan Fitra Riau
2. (Pengambilan Keputusan Tertinggi Perkumpulan Fitra Provinsi Riau)
3. Launching Kebijakan TAKE Kabupaten Bengkalis;
4. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Dalam Peningkatan Kinerja Ekologi Desa di Kabupaten Bengkalis & Siak

Desember 2021 –
Januari 2022

1. Penyusunan Policy Brief “Pemanfaatan DBH DR untuk Percepatan Implementasi Siak Hijau”
2. Roadshow DPRD Riau “Menagih Komitmen Kebijakan Daerah” Pro Disabilitas
3. Diskusi Expert: Menakar Peluang Penerapan Blended Finance Mendukung Siak Kabupaten Hijau
4. Pelaksanaan Kajian Implementasi dan Dampak ADD Migas di Pelalawan
5. Webinar Inisiatif Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Dan Gas Bumi di Daerah

Februari

1. Online Diskusi Bersama Pemda Indragiri Hulu “Pengenalan inisiatif Kebijakan TAKE”
2. Penulisan Policy Brief “Model Kebijakan TAPE Provinsi Riau”
3. Diskusi Tenaga Ahli Gubernur Riau “Sampaikan Usulan Konsep TAPE Riau Hijau”
4. FGD 1 Penyusunan Model Kebijakan Blended Finance dalam Mendukung Kebijakan Siak Hijau”
5. Online Diskusi Bersama Pemda Pelalawan “Pengenalan Inisiatif Penerapan Skema TAKE Kab Pelalawan”
6. Diskusi Bersama Pemda Inhu “Peluang Penerapan Implementasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)”

Maret

1. Diskusi Evaluasi penggunaan Sisa DBH DR tahun 2022 di Kabupaten Siak
2. Penulisan Policy Brief Peluang dan skema kebijakan TAKE Kabupaten pelalawan dan Indragiri Hulu;
3. Mendiskusikan Konsep kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi/TAKE Kabupaten Pelalawan
4. Diskusi Publik “Peluang Penerapan Kebijakan EFT di Provinsi Riau”
5. Diskusi Fasilitasi Penyusunan Konsep dan Indikator TAKE Kabupaten Indragiri Hulu;

April

1. Penyusunan policy Brief arah kebijakan pembangunan dan anggaran mendukung Siak Hijau;
2. Workshop pengembangan kebijakan kinerja ekologi melalui pemanfaatan sisa Dana Reboisasi di Kabupaten Pelalawan

Mei

1. Workshop dan Konsultasi Penggunaan DBH DR UNTUK insentif TAPE dan TAKE di Provinsi dan Kab/Kota
2. Fasilitasi skema kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi dengan reformulasi ADD dan DBH-DR II
3. Workshop Evaluasi Instrumen Penilaian Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Bengkalis

Juni

Juli

1. Diskusi Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perbup TAKE-DBH DR di Kabupaten Siak
2. Pelatihan Operator Sistem Assesment Pemerintah Kampung di Kabupaten Siak
3. Pelatihan Tim Assesment Penilaian Kinerja Desa berbasis Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE).
4. FGD "Persiapan Pelaksanaan Kebijakan BKK Insentif TAKE Inhu 2022
5. Workshop "Sosialisasi dan Pembekalan Tim Assesment Penilaian Kinerja Desa Kabupaten INHU"

Agustus

1. Diskusi Fasilitasi persiapan pelaksanaan penilaian kinerja TAKE Pelalawan di Pemda Pelalawan
2. Workshop " Sosialisasi dan Pembekalan Tim Assesment Penilaian Kinerja Desa Kabupaten Pelalawan"
3. Diskusi Fasilitasi Penyusunan Konsep Kebijakan TAKE Pelalawan Melalui Skema DBH-DR III
4. Penyusunan Kajian "Komitmen Riau Hijau dalam Kebijakan Pembangunan dan Anggaran Daerah"

September

1. Workshop Input dan Analisis Data Penilaian Kinerja Desa Inhu 2022
2. FGD "Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Desa Kabupaten Indragiri Hulu"
3. Diskusi koordinasi bersama PEMKAB Siak dalam mendorong penggunaan sisa Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR)
4. Workshop Input dan Analisis Data Penilaian Kinerja Desa Pelalawan 2022
5. Penyusunan kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Siak Hijau
6. Workshop Penyusunan Kajian Blended Finance Mendukung Siak Hijau

Oktober

1. Diskusi Publik diseminasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kebijakan Siak Hijau
2. Fasilitas Pemda Pelalawan dalam Penyusunan RKP DBH-DR Untuk Insentif Tahun 2023
3. Diskusi Konsultasi Penyusunan Perbup Insentif TAKE bersama 4 daerah kabupaten.
4. Workshop & Fasilitasi Input Data Hasil Assesment Penilaian Kinerja Ekologi Fiskal (TAKE) di Kabupaten Bengkalis
5. FGD Pembahasan Hasil Indeks kinerja di Kantor DPMD Kabupaten Bengkalis
6. Diskusi Publik "Rembuk Riau Hijau" Kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau
7. FGD Pembahasan Hasil Kajian Blended Finance
8. Seminar Gagasan Konsep Blended Finance dan Pengembangan DBH-DR TAKE Siak Hijau
9. FGD Bahas Diseminasi Konsep Collaboratif Finance Untuk Siak Hijau.
10. Diskusi Pembahasan Perbub BKK TAKE Pemerintah Kabupaten Pelalawan Wujudkan Anggaran Berbasis Ekologi

November

1. Training Anggaran Berkerja sama dengan Universitas Lancang Kuning Riau
2. Penyusunan Kajian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau

Desember

1. Training Digitalisasi Desa bersama 5 Pemerintah Desa;
2. Penulisan Brief Kebijakan TAKE Siak Dengan Skema DBH DR
3. Publikasi Kebijakan TAKE Siak dengan Skema DBH DR;
4. Publikasi Kajian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau

AGENDA UTAMA FITRA RIAU

- 14** Agenda Transformasi Kelembagaan
- 19** Agenda Riset dan Advokasi





Agenda Transformasi Kelembagaan

Diperlukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang mampu dan dipercaya sebagai agen kontrol sosial untuk mewujudkan kebijakan pelayanan publik dan penganggaran yang berpihak terhadap kesejahteraan rakyat melalui agenda riset dan advokasi. Untuk mencapai hal itu ditetapkan agenda strategis transformasi kelembagaan sebagai berikut:

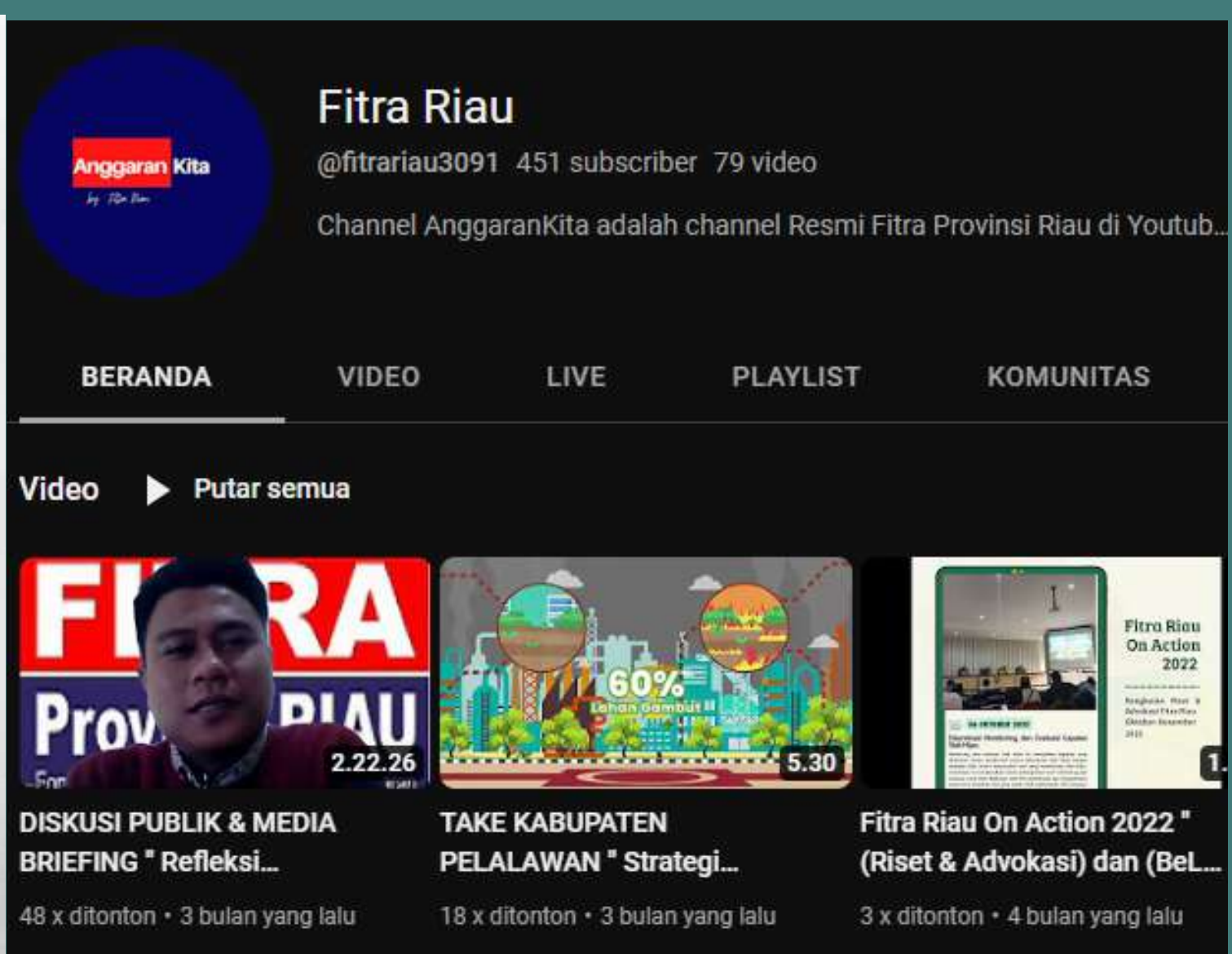
Mengembangkan Pusat Pengetahuan Anggaran/Budget Resource Center (BRC)



Pusat pengetahuan anggaran merupakan agenda bersama jaringan Seknas Fitra se Indonesia. Sebagai agenda untuk memperkuat jaringan Fitra dalam memperluas gerakan advokasi anggaran. BRC diwujudkan dalam empat bentuk yaitu FITRA sebagai pusat data anggaran, pusat informasi anggaran, pusat pengetahuan anggaran, pusat belajar anggaran. Dalam agenda pengembangan budget resource center ini Fitra Riau telah bekerja untuk beberapa hal yang mendukung terwujudnya 4 capaian BRC tersebut.



Salah satu wujud dari pengembangan BRC di Fitra Riau adalah program Belajar Analisis Anggaran (BeLA-Anggaran). Program ini merupakan sekolah anggaran Fitra Riau sebagai upaya menuju Fitra Riau sebagai pusat belajar anggaran yang telah dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Tahun 2022, Fitra Riau menginisiasi pelaksanaan kelas BeLA-Anggaran berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Riau (Universitas Lancang Kuning-Fakultas Ilmu Administrasi Publik) yang melibatkan mahasiswa sebagai pesertanya. Selain itu, tahun 2022 juga melaksanakan program magang untuk alumni Bela Anggaran terpilih untuk pendalaman terhadap materi-materi secara langsung di Kantor Fitra Riau.



Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagai pusat data dan pusat informasi, Fitra Riau secara terus menerus mengupdate data dan informasi seputar perencanaan pembangunan, anggaran serta data-data kondisi pembangunan daerah dari sumber-sumber terpercaya untuk 12 Kabupaten/Kota dan Provinsi. Mulai tahun 2019, Fitra Riau juga mengupdate data-data yang berkaitan dengan anggaran di Desa. Data-data tersebut dikemas sebagai informasi bagi publik dalam bentuk factsheet dan juga dalam bentuk infografis. Sebagai pusat pengetahuan Fitra Riau juga mengembangkan platform YouTube sebagai sarana diskusi dan sharing pengetahuan baik dalam bentuk penguatan kapasitas maupun pembahasan hal-hal menarik sesuai dengan momentum.

Mengembangkan alternative pendanaan untuk menjamin keberlanjutan advokasi berbasis riset yang tidak bergantung dengan donor.



Salah satu tantangan keberlanjutan organisasi adalah dukungan pendanaan. Sumber dana mutlak dari donor dan berbasis program akan mengancam keberlanjutan operasional organisasi. Sehingga diperlukan langkah-langkah alternative yang dapat menopang pendanaan organisasi dimasa yang akan datang. Sembari tetap mempertahankan kepercayaan lembaga donor agar tetap dipercaya mengelola program dengan dukungan dana donor.

Mulai tahun 2022, sebagai wujud dari upaya menciptakan alternative pendanaan Fitra Riau menjalankan program pengembangan digitalisasi desa.

Program ini diinisiasi dengan dukungan program Seknas Fitra Riau melalui program build Ford Foundation. Tahun 2022, program pengembangan digitalisasi desa berbayar telah diimplementasikan di 5 Desa di Riau. Dengan pembiayaan dua Desa membayar biaya pelatihan kepada Fitra Riau sebesar Rp. 6.600.000,- per Desa dan 3 Desa dengan membiayai sendiri peserta yang mengikuti pelatihan digitalisasi Desa. Sehingga tahun 2022 Fitra Riau mendapatkan pendapatan dari usaha pengembangan digitalisasi desa secara langsung sebesar Rp. 13.200.000,- dan pembiayaan tidak langsung sebesar Rp. 19.800.000,-.



Penguatan kapasitas Personil Fitra Riau

Untuk mendukung kinerja organisasi diperlukan sumberdaya manusia berkualitas, memiliki keterampilan dan produktif. Kami menyadari, kapasitas sumberdaya selain kuantitas terbatas juga menghadapi tantangan kualitas yang masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam advokasi Fitra Riau dihadapkan pada tantangan perkembangan zaman yang menuntut adaptasi lembaga Fitra Riau. Sehingga kami terus berupaya melakukan penguatan kapasitas personil Fitra Riau dalam berbagai hal. Seperti keterampilan dalam bidang research, olah data, komunikasi publik dan bidang lainnya

yang mendukung kinerja organisasi.

Tahun 2022, sebagaimana kelanjutan tahun-tahun sebelumnya, Fitra Riau terus berupaya melakukan penguatan kapasitas personil baik kegiatan yang dilakukan oleh internal organisasi maupun mengikut sertakan personil dalam agenda penguatan kapasitas yang dilakukan oleh pihak lain (organisasi lainnya). Agenda penguatan kapasitas tahun 2022 internal Fitra Riau meliputi penguatan kapasitas personil dalam management pengelolaan program, penulisan artikel, pembuatan story telling.

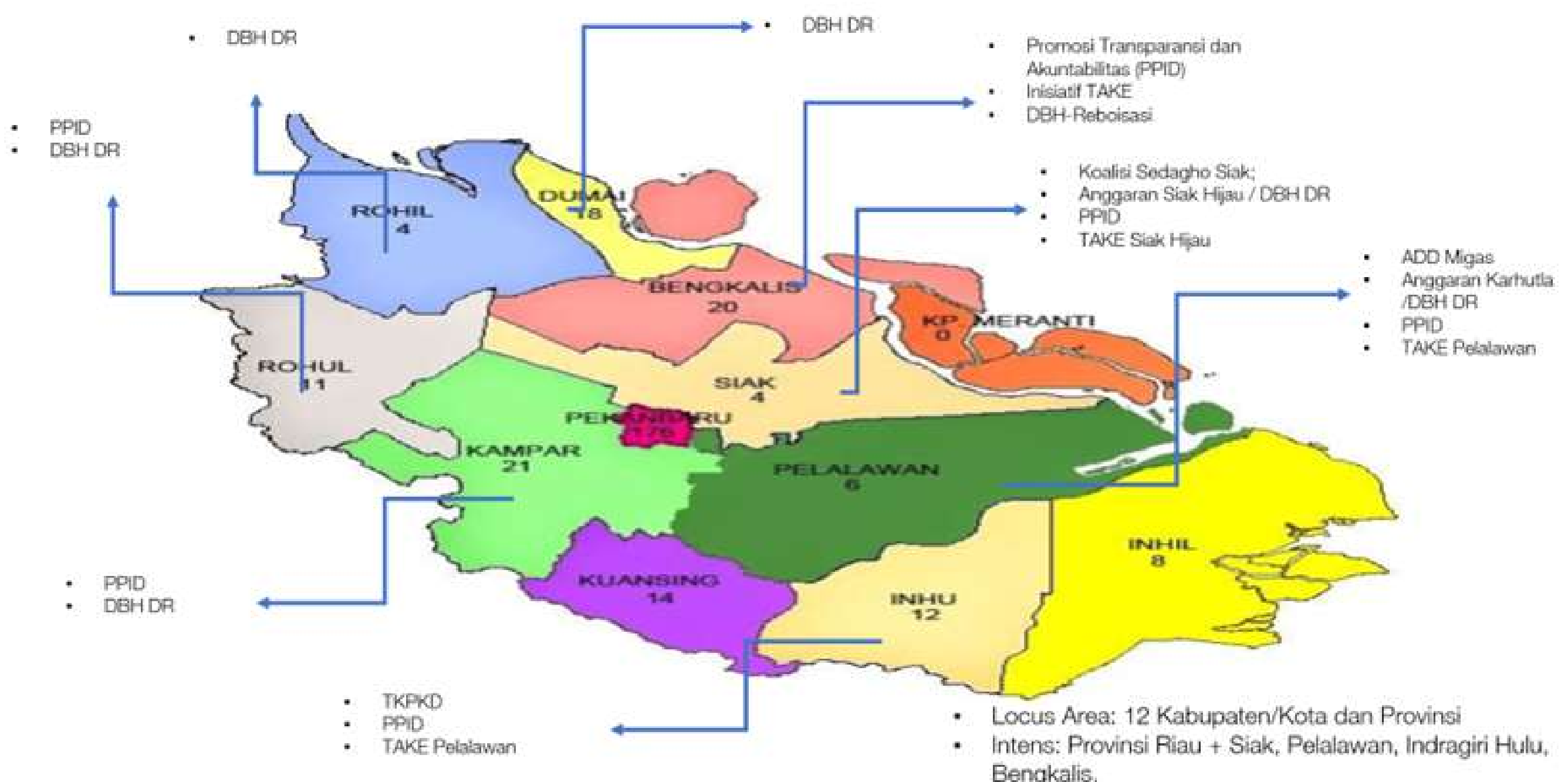
Penguatan manajemen pengelolaan keuangan Lembaga Fitra Riau

Fitra Riau terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan lembaga, guna memastikan akuntabilitas Fitra Riau sebagai lembaga organisasi masyarakat sipil. Penguatan manajemen pengelolaan keuangan juga untuk meningkatkan performa organisasi Fitra Riau dalam kerjasama dengan lembaga donor. Tahun 2022, Fitra Riau berhasil meningkatkan portofolio pengelolaan keuangan menjadi sebesar Rp. 2,09 Milyar, dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 1,2 Milyar. Dana tersebut merupakan akumulasi dari dana program dan dana tidak terikat (internal) yang dikelola lembaga Fitra Riau. Tahun 2022, Fitra Riau juga kembali dipercaya donor Ford Foundation untuk program jangka menengah tahun 2023-2024 sebesar Rp. 2,3 Miliar.

Upaya penguatan dan perbaikan management keuangan lembaga, berupa penguatan personil pengelola keuangan Fitra Riau dengan mengikut serta pada lembaga yang kompeten. Konsolidasi laporan keuangan dalam satu server data, penertiban administrasi keuangan (laporan pajak), menjalankan fungsi pengawasan internal melalui badan pengawas Fitra Riau. Tahun 2022, juga dilakukan pemantapan SOP keuangan lembaga Fitra Riau, dan membangun sistem salary bagi staff inti Fitra Riau. Tahun 2022, Fitra Riau sukses dalam penyajian laporan program untuk CLUA 2021-2022 dan Program atas kerjasama The Asia Foundation (TAF) dengan predikat wajar.

Membangun dan memperluas kerjasama

Peta Kerjasama dengan Pemerintah Daerah



Untuk mempertahankan eksistensi lembaga serta mendukung capaian keberhasilan advokasi Fitra Riau maka peningkatan komunikasi eksternal dan memperluas jaringan (networking) menjadi keharusan terhadap konstituen dalam hal ini pemerintah dan lembaga negara lainnya, kampus,

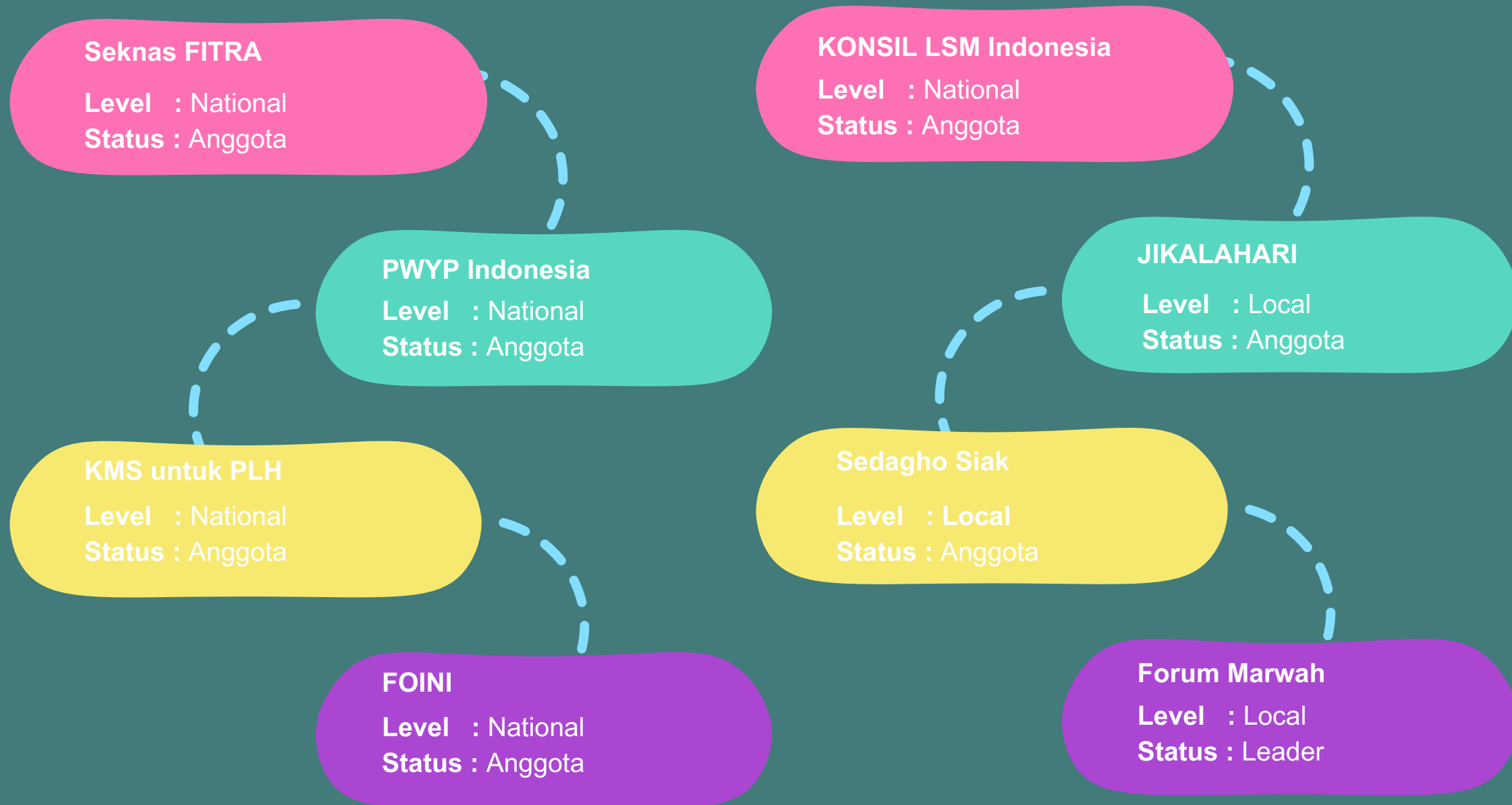
CSO lokal dan nasional, dan masyarakat. Hingga tahun 2022, Fitra Riau meningkatkan intensifitas bermitra dengan pemerintah daerah baik melalui program-program khusus maupun agenda internal lembaga Fitra Riau. Berikut peta kolaborasi bersama pemerintah Daerah hingga tahun 2022.

Tahun 2022, Fitra Riau juga terlibat dalam agenda kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Seperti:

- Terlibatnya Fitra Riau dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak melalui SK Bupati Siak. (2021-2022)
- Terlibat dalam kelompok kerja perhutanan sosial (Pokja PPS) Provinsi Riau melalui SK Gubernur Riau, 2022 - sekarang
- Fitra Riau terlibat dalam Tim Sekretariat Siak Hijau (TKSH) sebagai perwakilan dari masyarakat Sipil; 2022 – sekarang;

Hingga tahun 2022, Fitra Riau juga mampu mempertahankan jaringan advokasi bersama CSO baik lokal maupun nasional yang telah terbangun pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022, secara intens Fitra Riau terlibat dalam gerakan advokasi anggaran lingkungan hidup melalui koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan lingkungan hidup (KMS-PLH) yang telah berhasil menginisiasi kebijakan strategis khususnya kebijakan anggaran lingkungan hidup di Indonesia. Tahun 2022, Fitra Riau juga membangun jejaring dengan universitas untuk agenda-agenda strategis advokasi.

Berikut adalah peta jejaring Fitra Riau bersama CSO dan universitas hingga tahun 2022



Jaringan lainnya yang telah terbangun dan dipertahankan hingga saat ini

Perguruan Tinggi



Lembaga Negara yang Ada di Daerah



Agenda Riset dan Advokasi

Promosi Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Promosi transparansi dan akuntabilitas merupakan core isu sejak Fitra Riau di dirikan. Fitra Riau memandang transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan masih perlu untuk terus dikawal. Di Indonesia era keterbukaan informasi telah berjalan lebih dari satu dekade, akan tetapi dalam implementasinya belum berjalan secara optimal. Prinsip keterbukaan belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, masyarakat masih kesulitan untuk mengakses informasi strategis, yang menjadi faktor masih tingginya potensi korupsi. Fitra Riau memandang transparansi menjadi syarat akuntabilitas. Transparansi juga menjadi prasyarat terwujudnya good governance.

Pada agenda ini riset dan advokasi dijalankan Fitra Riau

berkerja pada tiga area utama yaitu, mendorong penguatan sistem layanan informasi public melalui penguatan kapasitas, technical asistensi, monitoring dan evaluasi komitmen dan kinerja daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi public sebagaimana diatur dalam UU. Fitra Riau juga memberdayakan komunitas sebagai penerima manfaat dari keterbukaan informasi publik melalui penguatan kapasitas, technical asistensi dalam mengakses dan menggunakan informasi public. Pada area yang lain, Fitra Riau juga bekerjasama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) provinsi Riau untuk mendorong kebijakan dalam mengakselerasi keterbukaan informasi dilevel daerah seperti penerima SK, surat edaran dan penguatan kapasitas komisi informasi.

Kebijakan Fiskal Proporsional dan Pro Poor

APBN/D merupakan instrumen ekonomi strategis bagi pemerintah daerah dan pembangunan. Dalam konteks ini, Fitra Riau bekerja untuk memastikan anggaran daerah dikelola dan dibelanjakan secara proporsional, efektif, efisien, dan responsif terhadap kepentingan kelompok miskin dan terpinggirkan, yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Fitra Riau juga mendorong inovasi dalam kebijakan anggaran daerah dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya mendorong perbaikan kebijakan anggaran.

Riset dan advokasi diperankan Fitra Riau dalam mendorong agenda kebijakan anggaran layanan publik,

gender, disabilitas dan reformasi pendanaan lingkungan hidup. Fitra Riau memiliki andil besar dalam upaya reformasi kebijakan anggaran daerah yang pro terhadap lingkungan hidup dalam 6 tahun terakhir. Pendekatan riset dan advokasi telah berhasil dalam menginisiasi inisiatif kebijakan yang telah dijalankan pemerintah daerah di Riau. Fitra Riau sejauh ini masih menjadi rujukan media dalam isu kebijakan anggaran daerah. Tahun 2022, Fitra Riau juga mulai bekerja untuk mendorong kebijakan anggaran disabilitas di daerah berkolaborasi dengan jaringan kelompok disabilitas Provinsi Riau.

Anti Korupsi dan Pelayanan Publik

Melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, Fitra Riau bekerja untuk mempromosikan dan melakukan monitoring kasus korupsi dan upaya pencegahannya. Di bidang pelayanan publik, Fitra Riau berupaya untuk

memastikan bahwa pelayanan dasar publik dapat diakses dan memenuhi kebutuhan semua jenis masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok difabel, dan masyarakat rentan lainnya.

Program dan Pencapaian FITRA RIAU Tahun 2022

- 21** Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Pelalawan
- 22** Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Indragiri Hulu
- 23** Pengembangan Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Bengkalis
- 24** Penguatan Kapasitas Pemerintah Kampung/Desa Dalam meningkatkan Kinerja Ekologi Desa;
- 25** Pendampingan Keberlanjutan dan Pengembangan Kebijakan TAKE Siak Hijau
- 26** Kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Siak Hijau
- 27** Kajian Menggagas BPD LH Daerah
- 28** Kajian Dampak Kebijakan ADD berbasis Migas di Pelalawan
- 29** Mendorong Kebijakan TAPE Riau Hijau
- 30** Riset Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Anggaran di Riau

Support



The Asia Foundation

LAUNCHING: KEBIJAKAN TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) PELALAWAN

“Strategi Kebijakan Pelalawan Sejuk
Untuk Mendukung Pelalawan Maju 2023”

26 Januari



Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Pelalawan

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

Pelaksanaan:
Februari – Oktober 2022

TUJUAN PROGRAM

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

Program ini berhasil mendorong pemerintah kabupaten Pelalawan menerapkan kebijakan TAKE sebagai alternatif kebijakan keuangan dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan; Adapun capaian yang dihasilkan adalah:

- Berhasil menetapkan kebijakan TAKE Kabupaten Pelalawan melalui skema Alokasi ADD 2023; dengan menambah indikator kinerja Ekologi dalam pendistribusian ADD ke Desa;
- Berhasil menginisiasi Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) insentif berbasis ekologi ke Desa melalui DBH DR.
- Menetapkan Rp. 4,08 Milyar alokasi ADD didistribusikan dengan skema Kinerja dan Rp. 2 Milyar BKK ke Desa berdasarkan kinerja ekologi Desa.
- Berhasil menerbitkan hasil penilaian kinerja Desa tahun 2022 dan data base kinerja desa dalam tata kelola pemerintah desa, kualitas pembangunan Desa dan Desa Peduli Lingkungan.

JARINGAN

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Dalam Negeri
- Biro Hukum Provinsi Riau
- Bappeda Kabupaten Pelalawan
- Dinas PMD Kabupaten Pelalawan
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pelalawan
- Bagian Hukum Pemkab Pelalawan
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pendanaan Lingkungan Hidup (KMS-PPLH)

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

Proses advokasi selama 9 Bulan (Mei – Oktober 2023), dengan proses dan tahapan sebagai berikut:

- Fitra Riau melakukan penyusunan Policy Brief peluang penerapan TAKE Pelalawan & penyusunan Policy Brief Konsep TAKE melalui Kebijakan DBH DR;
- Fitra Riau bersama dengan Pemda Pelalawan melakukan serial diskusi mulai dari penyamaan pemahaman terkait kebijakan, membangun kesepakatan, fasilitasi teknis perumusan kebijakan., indikator penilaian kinerja dan Legal Drafting Regulasi Kebijakan TAKE Pelalawan;
- Fitra Riau memfasilitasi diskusi Konsultasi Bersama Kementerian Terkait;
- Fitra Riau Fasilitasi Penilaian Kinerja Desa Kabupaten Pelalawan 2022;
- Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;



Program ini bertujuan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan hidup. Program ini dialamatkan untuk mendorong pemerintah daerah menciptakan inovasi alternatif pendanaan lingkungan hidup. Dalam wujud Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Pelalawan.



Support



The Asia Foundation

Mendorong Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Indragiri Hulu

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM



Program ini bertujuan memperluas penerapan insiatif pendanaan lingkungan hidup sebagai strategi mengatasi permasalahan lingkungan hidup di daerah. Alternatif kebijakan yang dipromosikan adalah ecological fiscal transfer (EFT) sebagaimana telah dikembangkan daerah lainnya di Riau dalam bentuk TAKE. TAKE merupakan insentif atas kinerja lingkungan hidup yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa yang berkinerja baik.

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Policy brief konsep kebijakan TAKE Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terumuskannya kebijakan TAKE Indragiri Hulu melalui skema DBH DR;
- Dihasilkan penilaian kinerja desa kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022;

Note: Hingga akhir 2022, dorongan kebijakan ini belum berhasil sampai diimplementasikan TAKE tahun 2023 oleh Pemda Indragiri Hulu.

JARINGAN/MITRA

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Dalam Negeri
- Biro Hukum Provinsi Riau
- Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu
- Bappeda Indragiri Hulu,
- Inspektorat,
- Dinas Lingkungan Hidup
- Forum Kecamatan
- Pendamping Desa
- KMS-PPLH

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Penyusunan Konsep Kebijakan TAKE Kabupaten Indragiri Hulu’;
- Fitra Riau melakukan serial diskusi (8 kali pertemuan) mulai dari pengenalan kebijakan, pembahasan konsep, penentuan indikator kinerja desa, legal drafting dan serial diskusi konsultasi dengan pihak lainnya.
- Fitra Riau melakukan fasilitasi penilaian kinerja desa (178 Desa) se Kabupaten Indragiri Hulu;
- Penguatan kapasitas tim penilaian kinerja Desa,
- Penguatan kapasitas pemerintah Desa;
- Diskusi pembahasan hasil kinerja Desa sebagai dasar penentuan insentif kinerja Desa.



Support



The Asia Foundation

LAUNCHING

Kebijakan Transfer Anggaran
Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)
Kabupaten Bengkalis

31 Januari

Pengembangan Kebijakan Ecological Fiskal Transfer (TAKE) di Kabupaten Bengkalis

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Pemerintah Kabupaten Bengkalis Komitmen melanjutkan Kebijakan TAKE tahun 2023 dengan meningkatkan alokasi ADD berbasis kinerja dari 5% menjadi 10% melalui revisi Perbup Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD).
- Alokasi kinerja TAKE tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 26,0 Milyar yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa;
- Dihasilkan penilaian kinerja dan data base desa hasil pemetaan kinerja desa tahun 2022.

JARINGAN/MITRA

- Kementerian Keuangan
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Dalam Negeri
- Biro Hukum Provinsi Riau
- Dinas PMD Kabupaten Bengkalis
- Bappeda Bengkalis
- Inspektorat,
- Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis
- Forum Kecamatan Bengkalis
- Pendamping Desa
- KMS-PPLH

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Fitra Riau memfasilitasi evaluasi penilaian kinerja desa dalam mendukung pembangunan desa dan desa peduli lingkungan melalui workshop bersama pemangku kepentingan terkait.
- Fitra Riau memfasilitasi proses penilaian kinerja desa tahun 2022, melalui penguatan kapasitas tim penilaian kinerja, dan serial diskusi pembahasan hasil penilaian kinerja (6 kali pertemuan).
- Memfasilitasi proses penyusunan regulasi kebijakan TAKE Kabupaten Bengkalis;



Tahun 2021, Fitra Riau melalui dukungan The Asia Foundation (TAF) berhasil mendorong Pemda Bengkalis untuk menerapkan kebijakan TAKE melalui skema ADD berbasis kinerja Lingkungan Hidup. Tahun 2022, Program ini dilakukan untuk mengawal sekaligus melakukan pengembangan kebijakan TAKE. Program ini juga untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan TAKE 2022, baik dari aspek proporsi alokasi kinerja, indikator kinerja desa, serta dampaknya terhadap pemerintah dan masyarakat Desa.

Support



The Asia Foundation

Penguatan Kapasitas Pemerintah Kampung/Desa Dalam meningkatkan Kinerja Ekologi Desa

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

Pelaksanaan:
Desember-Januari 2022

TUJUAN PROGRAM



Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan lokal skala desa. Program ini juga dimaksudkan guna memberikan sosialisasi kepada pemerintah Desa dalam memahami kebijakan TAKE di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak;

Fokus penguatan kapasitas adalah bagaimana memandu Desa dalam merencanakan agenda program dan kegiatan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan lokal skala desa. Yang didasarkan dari indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah Desa. Seperti, merencanakan kebijakan Desa, inovasi desa, kegiatan desa serta membangun kelembagaan desa peduli lingkungan hidup.

PENERIMA MANFAAT

- Penerima manfaat program ini adalah pemerintah Desa (Perangkat Desa dan BPD) 80 Desa di Kabupaten Bengkalis dan 60 Desa di Kabupaten Siak. Dengan jumlah peserta penguatan kapasitas sebanyak 280 perangkat Desa.

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Modul integrasi pembangunan desa dengan program perlindungan lingkungan hidup;
- Perangkat Desa di 140 Desa di Bengkalis dan Siak memahami konsep kebijakan TAKE kabupaten Bengkalis dan TAKE Kabupaten Siak;
- Peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang pro terhadap perlindungan lingkungan hidup.

JARINGAN/MITRA

- Dinas PMD Kabupaten Bengkalis
- Dinas PMD Kabupaten Siak
- Kecamatan
- Pemerintah Desa (140 Desa)
- LPSEM

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Fitra Riau melakukan pelatihan secara bertahap kepada 140 Desa yang terbagi dalam 10 kali;



Pendampingan Keberlanjutan dan Pengembangan Kebijakan TAKE Siak Hijau

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Diterbitkannya policy Brief pengembangan TAKE Kabupaten Siak melalui skema DBH Reboisasi.
- Hasil penilaian kinerja kampung hijau (Indeks Kampung Hijau) tahun 2022 sebagai dasar insentif tahun 2023);
- Pengembangan TAKE melalui skema BKK Insentif berbasis kinerja, melalui Peraturan Bupati dan dialokasikan sebesar Rp. 2 Milyar untuk 20 Kampung Terbaik hasil penilaian tahun 2022.
- Kebijakan TAKE dengan skema ADK;
- Terselenggaranya pelaksanaan assessment kinerja Kampung tahun 2022 berbasis sistem informasi;

JARINGAN/MITRA

- Kementerian Keuangan;
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian LHK
- Dinas PMK kabupaten Siak
- Windrock Internasional
- KMS-PPLH

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Fitra Riau menyusun konsep paper Model Kebijakan TAKE Siak Hijau melalui skema pemanfaatan DBH Dana Reboisasi;
- Serial diskusi publik, technical asistensi, desiminasi konsep, pembahasan regulasi, konsultasi pemerintah pusat;
- Fasilitasi penilaian kinerja Kampung Hijau (IKH) 2022, mulai dari penguatan kapasitas tim penilai, penguatan kapasitas perangkat Kampung dalam penggunaan Aplikasi dan pembahasan hasil penilaian kinerja Desa;
- Fasilitasi proses fasilitasi peraturan bupati terkait kebijakan TAKE Siak Hijau dengan skema BKK Insentif bersama Biro Hukum Provinsi Riau;



Program ini bertujuan untuk pendampingan pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya percepatan implementasi Kebijakan Siak Hijau. Kebijakan TAKE Siak Hijau telah diimplementasikan sejak tahun 2020 melalui skema menambahkan indikator kinerja Ekologi dalam skema pendistribusian ADD/K. Tahun 2022, program ini secara spesifik ditujukan untuk memastikan keberlanjutan implementasi TAKE, pengembangan sistem data assessment dan pengembangan kebijakan TAKE melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Insentif dari pemanfaatan dana DBH Reboisasi.

Kajian Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Siak Hijau

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM



Agenda ini menjadi bagian dalam program peningkatan kebijakan pemerintah daerah kabupaten siak dalam mendukung percepatan Siak Hijau. Secara khusus diagendakan untuk melakukan kajian/riset untuk menghasilkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kebijakan Siak Kabupaten Hijau dalam periode 2018-2022 (5 Tahun). Kajian ini sekaligus menjadi baseline kebijakan Siak Hijau dimasa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau.

Fitra Riau berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten Siak, Tim Sekretariat Siak Hijau melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana pencapaian Siak Hijau berdasarkan roadmap Siak Hijau yang telah ditetapkan. Kajian ini juga untuk memetakan bagaimana para pihak (pemangku kepentingan) dalam hal ini Pemerintah Daerah, CSO, dan Privat Sektor berkolaborasi dalam agenda mencapai Siak Hijau.

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Diterbitkannya hasil kajian monitoring dan evaluasi Siak kabupaten Hijau 2018-2022;
- Diseminasi hasil kajian monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pencapaian Siak Hijau; ‘
- Data base hasil kajian monitoring dan evaluasi digunakan pemerintah daerah sebagai baseline data indikator Siak Hijau tahun 2022 dan ditetapkan menjadi sistem monitoring untuk memantau perkembangan Siak Hijau setiap tahunnya.

JARINGAN/MITRA

- Bappeda Siak
- Tim Sekretariat Siak Hijau (TSSK)
- Tim Koordinasi Siak Hijau (TKSH)
- Privat Sektor (KPPSH)
- Koalisi masyarakat sipil
- Sedagho Siak

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Penyusunan dan penyepakatan instrument kajian monitoring dan evaluasi bersama CSO dan Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan kajian monitoring dan evaluasi implementasi dan pencapaian Siak Hijau berkolaborasi bersama tim secretariat Siak Hijau (TSSH).
- Diseminasi hasil kajian monitoring dan evaluasi bersama pemangku kepentingan;

Support



The Asia Foundation

Kajian Menggagas BPD LH Daerah

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Penerbitan hasil kajian/Policy Brief “Menggagas BPD LH Daerah”
- Mendiseminasikan policy brief kepada pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Mendiseminasikan hasil kajian kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak yang dipandang memiliki modalitas untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai hasil kajian yang dilakukan.

JARINGAN/MITRA

- Kementerian Keuangan (BKF)
- BPD LH Republik Indonesia
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
- Sedagho Siak
- KMS-PPLH
- The Asia Foundation

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Diskusi penyusunan instrument Kajian bersama para expert dan koalisi masyarakat sipil untuk merumuskan kajian yang direncanakan;
- Pelaksanaan kajian, pengumpulan data, wawancara, review literatur dan penulisan temuan awal kajian
- Serial FGD bersama expert untuk penggalan persepektif multi pihak terhadap peluang penerapan BPD LH di Daerah;
- Worskhop Penyusunan Posisi paper “Menggagas BPD LH Daerah”;
- Diseminasi hasil kajian bersama pemangku kepentingan CSO, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- Desiminasi Kajian di forum Workshop Pembelajaran Ekologikal Fiskal Transfer di Surabaya yang diselenggarakan oleh KMS-PPLH.



Studi ini menjadi bagian dalam agenda mendorong reformasi kebijakan anggaran lingkungan hidup di daerah dengan skema alternatif pendanaan di daerah. Tantangan mendorong kebijakan anggaran lingkungan di daerah adalah keterbatasan sumberdaya APBD, sehingga diperlukan inisiatif khususnya bagi daerah yang memiliki komitmen tinggi perlindungan dan perlestarian lingkungan melalui kebijakan khusus. Kajian ini dimaksudnya guna mengidentifikasi bagaimana peluang daerah menerapkan skema Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) di daerah yang dapat menghimpun berbagai sumber pendanaan baik pemerintah maupun non pemerintah (Blended Finance).

Kajian ini fokus pada kajian peluang regulasi ditingkat pusat dan daerah yang berkaitan dengan keuangan, kewenangan daerah yang memungkinkan mendukung penerapkn inisiatif tersebut. Kajian ini juga melihat bagaimana peluang dan potensi yang mendukung di daerah untuk menerapkan kebijakan ini. Serta mengkaji bagaimana model yang dapat diterapkan. Kajian ini menggunakan pendekatan literatur review nasional dan international



Support

Publish
What You Pay
INDONESIA

Kajian Dampak Kebijakan ADD berbasis Migas di Pelalawan

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM



Fitra Riau berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2017 telah berhasil mendorong inisiatif kebijakan redistribusi bagi hasil migas yang diterima kabupaten kepada desa-desa penghasil melalui skema redistribusi ADD berbasis Migas. Kebijakan tersebut telah berjalan 5 tahun, dengan memberikan keistimewaan bagi desa-desa penghasil Migas mendapatkan ADD secara proporsional dari ADD yang berasal dari 10 % DBH Migas yang diterima daerah.

Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan ADD Migas bagi Desa penghasil Migas yang mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan dengan desa lainnya dilaksanakan sesuai dengan mandat dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar, dan penurunan kemiskinan. Melalui pendekatan wawancara, identifikasi APBDesa dan juga observasi lapangan di 6 desa penghasil/terdampak I dan terdampak II.

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Penerbitan hasil kajian dampak Implementasi ADD Berbasis Migas di 6 Desa Kabupaten Pelalawan.
- Diseminasi hasil kajian bersama pemangku kepentingan dan penguatan kebijakan oleh pemerintah daerah;

JARINGAN/MITRA

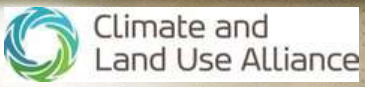
- PWYP Indonesia
- Koalisi PWYP Indonesia
- Pemerintah Daerah Pelalawan
- CSO di Provinsi Riau
- EITI Indonesia

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Pelaksanaan kajian dampak ADD berbasis Migas di Kabupaten pelalawan;
- Diseminasi hasil kajian dan FGD Optimalisasi kebijakan ADD Migas untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Penghasil;
- Seminas nasional, Desiminasi Kebijakan ADD Berbasis Migas sebagai agenda replikasi pada daerah lainnya di Indonesia.



Support



The Asia Foundation

Mendorong Kebijakan TAPE Riau Hijau

Isu/Agenda Riset dan Advokasi
Advokasi Kebijakan Anggaran

TUJUAN PROGRAM



Program ini bertujuan untuk mendorong reformasi kebijakan anggaran daerah khususnya dalam merespon persoalan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Juga sebagai agenda dalam percepatan implementasi kebijakan Riau Hijau. Studi dan advokasi dimaksudkan untuk memastikan pemerintah daerah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran yang memadai serta mendorong inisiatif pendanaan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Riau Hijau. Salah satu inisiatif yang didorong adalah kebijakan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Riau Hijau. Melalui program ini juga, Fitra Riau menawarkan agenda dan gagasan dalam kolaborasi multi pihak terhadap upaya perlindungan lingkungan baik melalui kebijakan Riau Hijau, maupun kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Diterbitkannya konsep kebijakan TAPE Riau Hijau dalam bentuk policy paper dan video pendek;
- Diterbitkannya hasil green budget tagging kebijakan Riau Hijau dalam perencanaan pembangunan dan anggaran daerah.
- Diseminasi konsep kebijakan TAPE Riau Hijau bersama pemangku kepentingan;

JARINGAN/MITRA

- Bappenas
- Bappeda Provinsi Riau;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Dinas Perkebunan
- KMS-PPLH
- Koalisi Masyarakat Sipil Riau

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Penyusunan konsep kebijakan TAPE Riau Hijau sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah di Riau dalam akselerasi percepatan Riau Hijau;
- Penyusunan green budget tagging anggaran lingkungan hidup di Riau
- Serial diskusi publik dan technical asistensi kepada pemerintah Provinsi Riau;
- Diskusi Publik Rembuk Riau Hijau bersama pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, NGO dan Privat Sektor) di Provinsi Riau;





CAPAIAN YANG DIHASILKAN

- Publikasi hasil kajian indeks keterbukaan informasi anggaran (KIA) pemerintah daerah Provinsi Riau;

JARINGAN/MITRA

- Universitas Lancang Kuning
- Pemerintah Provinsi Riau

DETAIL KEGIATAN DILAKUKAN:

- Evaluasi instrument penilaian indeks KIA 2022;
- Pelaksanaan tracking website proactive informasi pada tiga aspek dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaporan pertanggungjawaban.
- Diseminasi hasil kajian melalui konferensi press dan diskusi publik.

TUJUAN PROGRAM

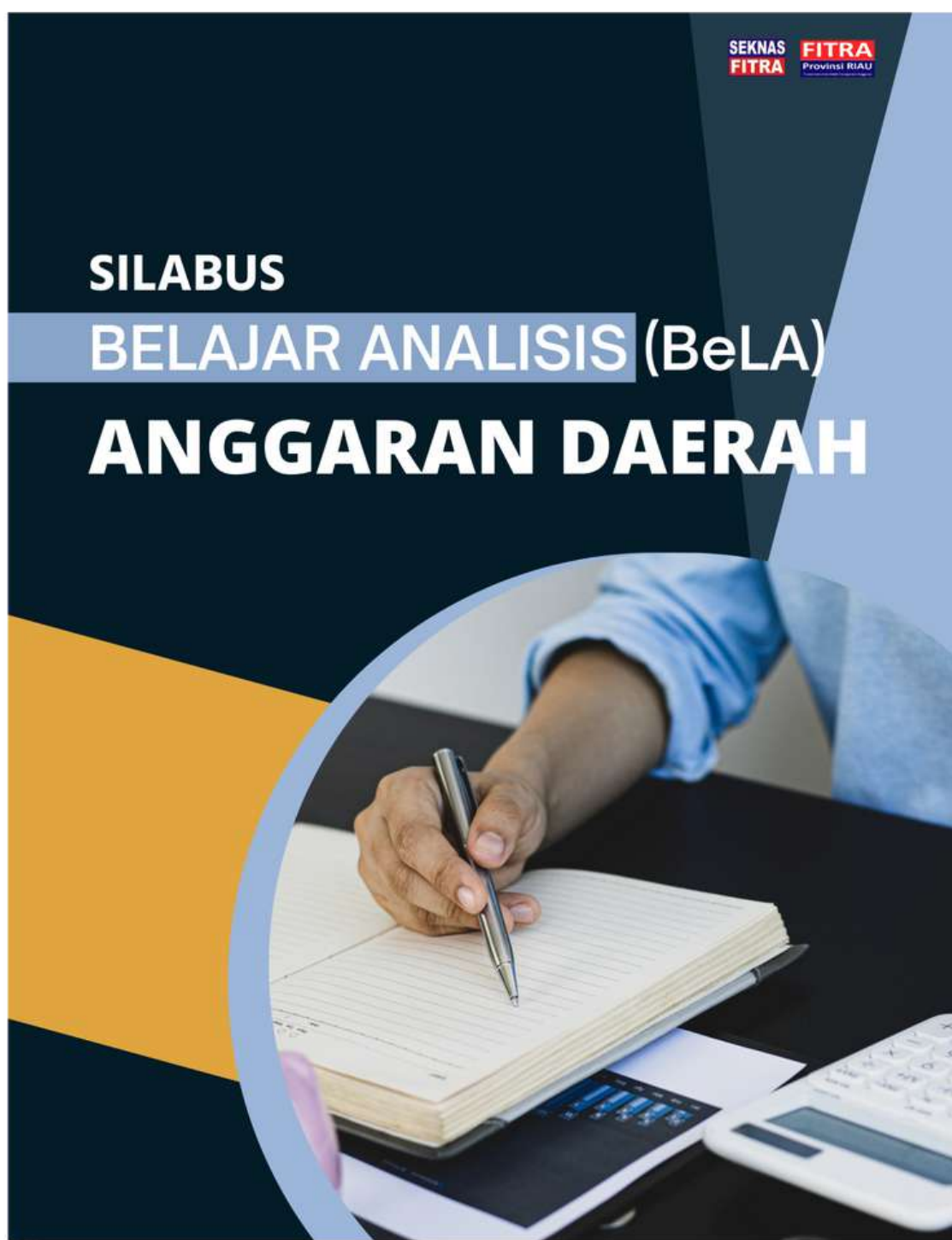


Riset dan advokasi ini bertujuan untuk melakukan penilaian kinerja keterbukaan informasi publik pemerintah daerah Provinsi Riau dengan pendekatan proactive discloses. Agenda ini secara rutin dilakukan Fitra Riau sejak tahun 2018 hingga saat ini. Setiap akhir tahun penilaian dilakukan dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.



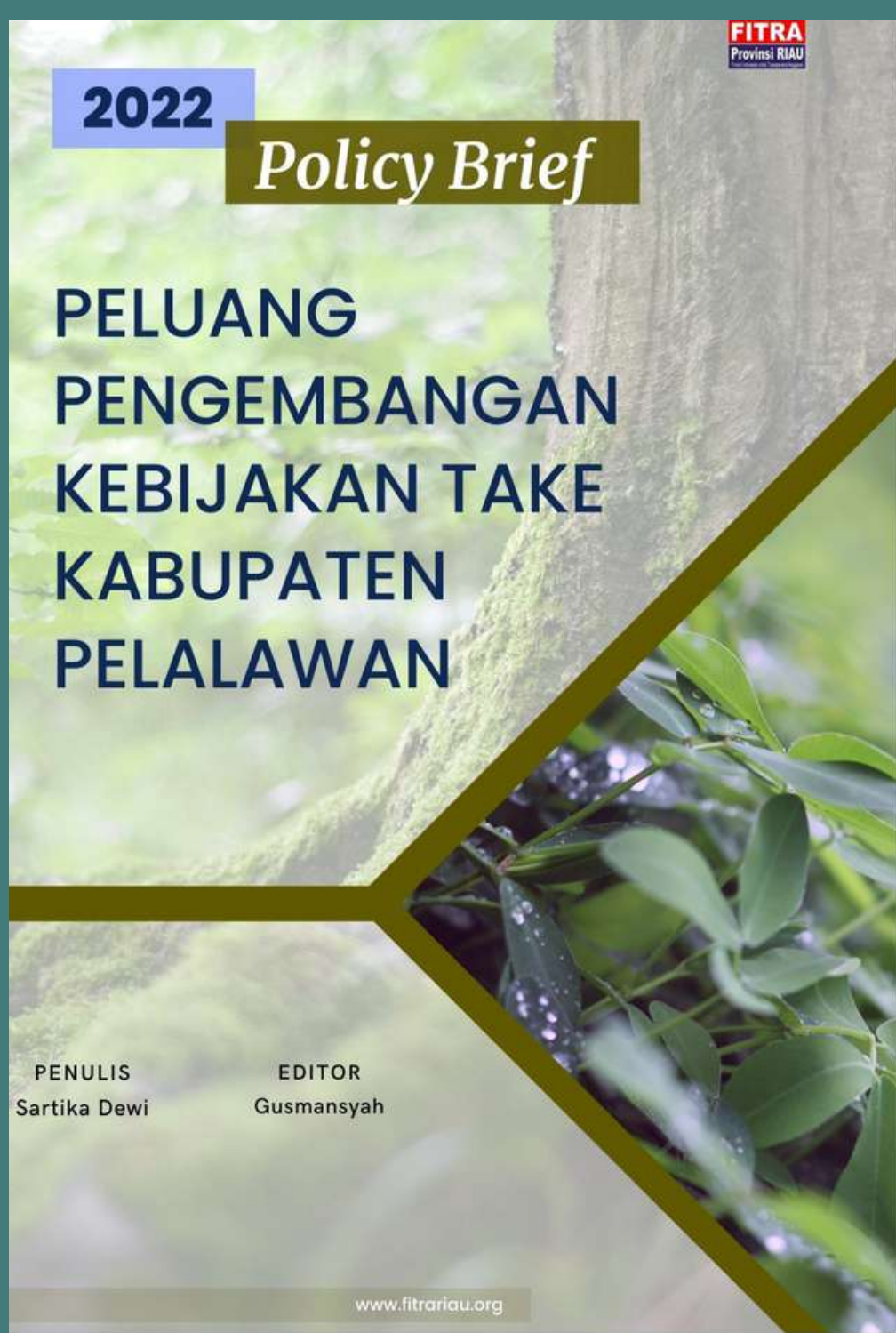
Publikasi FITRA RIAU tahun 2022

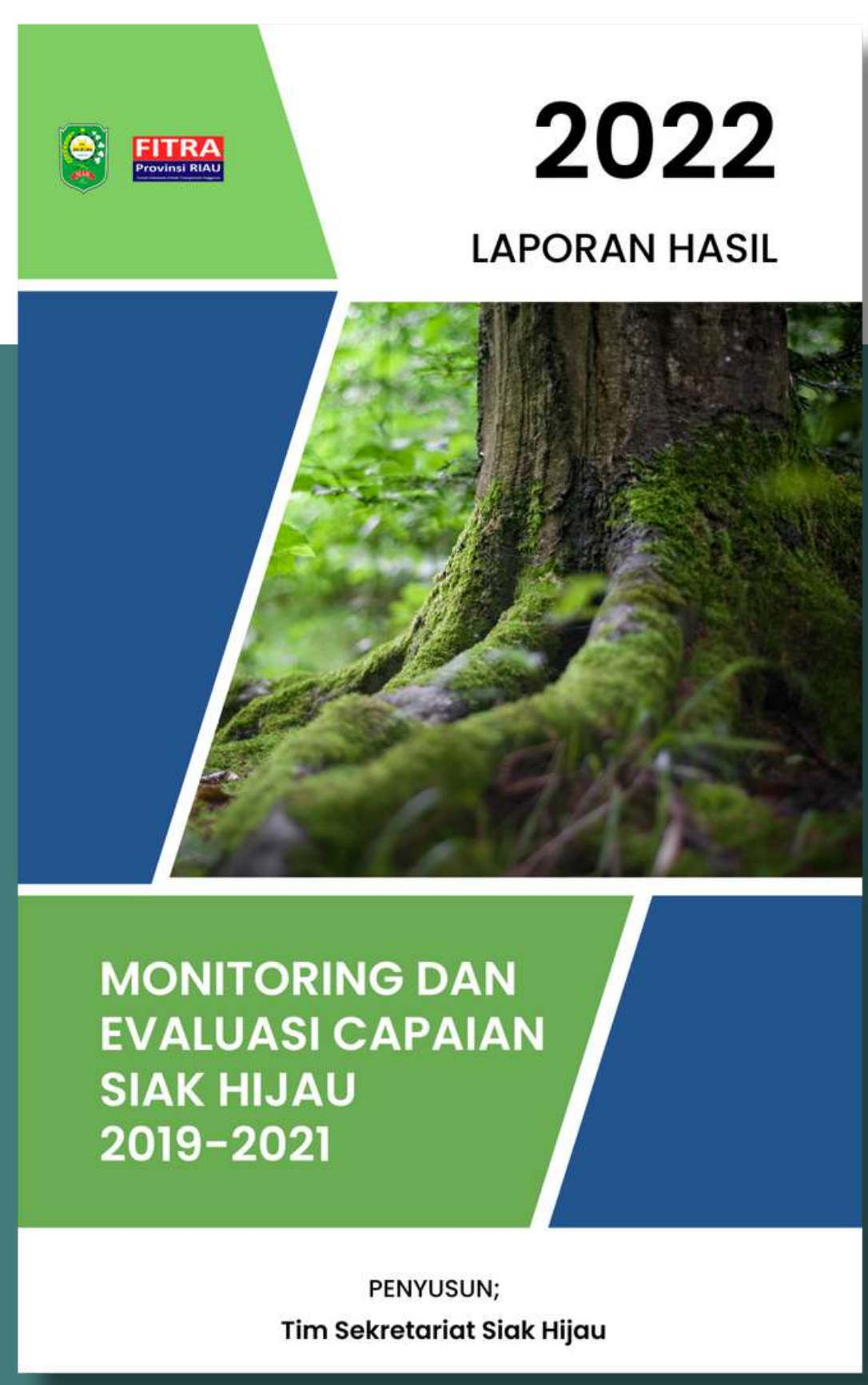
BUKU



POLICY BRIEF









PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) SIAK HIJAU MELALUI DANA REBOISASI (DBH DR) KABUPATEN SIAK

PENULIS :
TRIONO HADI

2022

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN (KIA)

Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota Tahun 2022



Penulis: Tarmidzi
Tim Tracking: Suci Lestari Putri, Sartika Dewi

PERS RILIS

Pers Release

Tidak Berkeadilan; Pemprov Riau Rencanakan Bangun Tower Perkantoran Dimasa Pandemi

Admin 2022-01-27



Fitra Riau 2022- Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2022 secara akumulasi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perkantoran mencapai Rp187,1 milyar. Apakah alokasi anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan tower gedung perkantoran, tidak dijelaskan lebih rinci dalam belanja daerah tersebut. Pemerintah daerah seharusnya membuka informasi lebih jelas terkait rencana pembangunan tower perkantoran yang tidak berorientasi kepada kepentingan publik.

Jika alokasi anggaran tersebut termasuk untuk pembangunan Gedung tower perkantoran pada tahun 2022 ini, maka pemerintah harus menjelaskan terkait urgensi pembangunan gedung perkantoran tersebut dimasa pandemi, apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat semakin menurun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sensitive dengan keadaan ekonomi masyarakat, yang semakin terbatas terhadap akses pemulihan ekonomi akibat pandemi covid. Meskipun kewajiban pemerintah telah memenuhi belanja untuk publik sesuai mandatori seperti belanja penanganan covid dan program PEN, serta benjaja publik lainnya.

Disatu sisi, kondisi perkantoran pemerintah saat ini masih sangat layak untuk digunakan, maka rencana untuk pembangunan dua tower perkantoran tersebut sama sekali tidak berdampak pada apapun, yang hanya diklaim sebagai pusat perkantoran yang terintegrasi.

Akan sangat tidak berkeadilan, jika anggaran tersebut tetap digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran yang baru, wacana ini ataupun sudah menjadi rencana pembangunan sangat tidak layak ungkapkan disaat kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas.

Pers Release

Akuntabilitas Keuangan dan SDM BUMD Migas di Riau Belum Baik

Admin 2022-02-17



FitraRiau- Pemerintah daerah di Riau sebagai pemilik saham BUMD yang bekerja disektor Migas, harus mengambil langkah strategis untuk memperbaiki manajemen di tubuh badan usaha plat merah itu. Karena menurut Fitra Riau kondisi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumberdaya manusia (SDM) pada perusahaan tersebut belum baik dan professional.

Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengatakan, Fitra Riau dan masyarakat sangat mendukung, langkah pemerintah daerah untuk mengambil bagian dalam pengelolaan usaha hulu Migas yang menjadi salah satu kekayaan SDA strategis di Riau. Namun, hal yang sangat penting adalah BUMD yang ditetapkan itu harus dikelola dengan baik, professional. Agar kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan bersama benar-benar dapat tercapai.

"Terdapat dua BUMD yang saat ini menjadi pengelola usaha hulu Migas di Riau. Yaitu PT. Bumi Siak Pusako, PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Kemudian PT. Riau Petroleum sebagai pengelola PI (Partisipasi Interest) di Blok Siak. Namun, manajemen pengelolaan ketiga perusahaan itu belum dapat dikatakan baik, kredibel dan professional", Tegas, Taufik.

Misalnya, PT. Bumi Siak Pusako (BSP), perusahaan pengelola blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu energi (PHE). Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, atas pengelolaan kegiatan operasional BUMD Migas PT. BSP tahun 2018-2020, menemukan sedikitnya Rp. 39,3 Milyar pengeluaran perusahaan yang bermasalah dan potensi merugikan keuangan negara.

"Temuan tersebut, berasal beberapa komponen pembiayaan seperti biaya entertainment, perjalanan dinas, pengelolaan dana CSR, biaya promosi perusahaan, sampai kepada pengelolaan gaji. Terdapat beberapa temuan yang berpotensi merugikan negara. Ini harus diperbaiki, apalagi 2022 ini PT. BSP akan menjadi pengelola tunggal Blok CPP", sebut Taufik.

Gubri Harus Batalkan Anggaran lapangan Tenis Rp 9,6 Miliar

Admin 2022-06-13



Fitri Riau - Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan Rp 9,6 Miliar dana APBD untuk membangun tiga lapangan tenis. Lapangan Tenis Kejaksaan Tinggi (Kejati) Rp 4.4 Miliar, Lapangan Tenis Pengadilan Agama Rp 1,9 Miliar, dan lapangan tenis tertutup Rp 3,1 Miliar. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, (FITRA Riau) mengomentari, Kebijakan Alokasi Anggaran yang di belanjakan di tahun 2022 menemukan bahwasanya, perilaku pemerintah masih tidak tahu malu "memboroskan anggaran" untuk belanja yang sama sekali bukan prioritas dan kebutuhan masyarakat Riau.

Kebijakan anggaran ini juga sangat jauh dari upaya pemerintah Riau untuk membawa Riau lebih baik kedepan. Selain itu, justru anggaran-anggaran semacam inilah yang menyandera kebutuhan prioritas masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara memadai. Jadi apa hubungannya membangun lapangan tennis dengan misi Riau Hijau atau dengan tujuan misi untuk Riau lebih baik. Ungkap Triono Hadi, Koordinator FITRA.

Alokasi anggaran ini mencerminkan tingkat sensitifitas Pemerintah Daerah terhadap masalah yang dihadapi warga sangat rendah, Padahal saat ini Warga sedang berupaya untuk pemulihan ekonominya akibat covid-19. Warga sedang berperang dengan harga bahan pokok yang tinggi yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk di tangani tapi justru pemerintah tidak sensitif bahkan lebih membelanjakan uang APBD untuk kebutuhan yang pastinya bukan masyarakat kecil. Siapa yang berolahraga itu? Tentu bukan warga kecil,"tambah Triono Hadi.

2022 Pemprov Riau Hamburkan Rp. 127 M Untuk Infrastruktur Bukan Prioritas dan Kewenangannya

Admin 2022-06-24



FR. Pemerintah Provinsi Riau konsisten mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur yang sama sekali bukan prioritas dan bukan pula kewenangannya. Tidak sedikit, sebesar Rp. 127.4 M, dialokasikan untuk membangun infrastruktur gedung-gedung yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi ini sangat miris, seyogyanya, situasi keuangan daerah saat ini, Riau lah yang harus mendapatkan dukungan anggaran dari pusat.

Rp. 127,4 Miliar itu, diperuntukkan untuk Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud Rp. 4.462 Miliar, Mako Lanal di Kota Dumai Rp. 37.470 Miliar, Manajemen Konstruksi Pembangunan MAKO BRIMOB Rp. 479 juta, Manajemen Konstruksi Pembangunan Mako Lanal Rp. 1.579 Miliar. Selain itu juga untuk membangun Manajemen Konstruksi Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp 987 Juta, Pembangunan MAKO BRIMOB Indragiri Hulu Rp. 10,05 milyar.

Tidak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp. 26.825 Milyar, Pengadaan Meubelair Makorem 031/WB Rp. 20 Miliar, Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud 13/PBY Rp. 232 Juta, Pengawasan Pembangunan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau (Lapangan Tenis) Rp. 100 juta. Selanjutnya, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan Pembangunan MAKO BRIMOB Indragiri Hulu Rp. 100 Juta, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp. 100 Juta, Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud 13/PBY Rp 304 Juta,

EDITORIAL

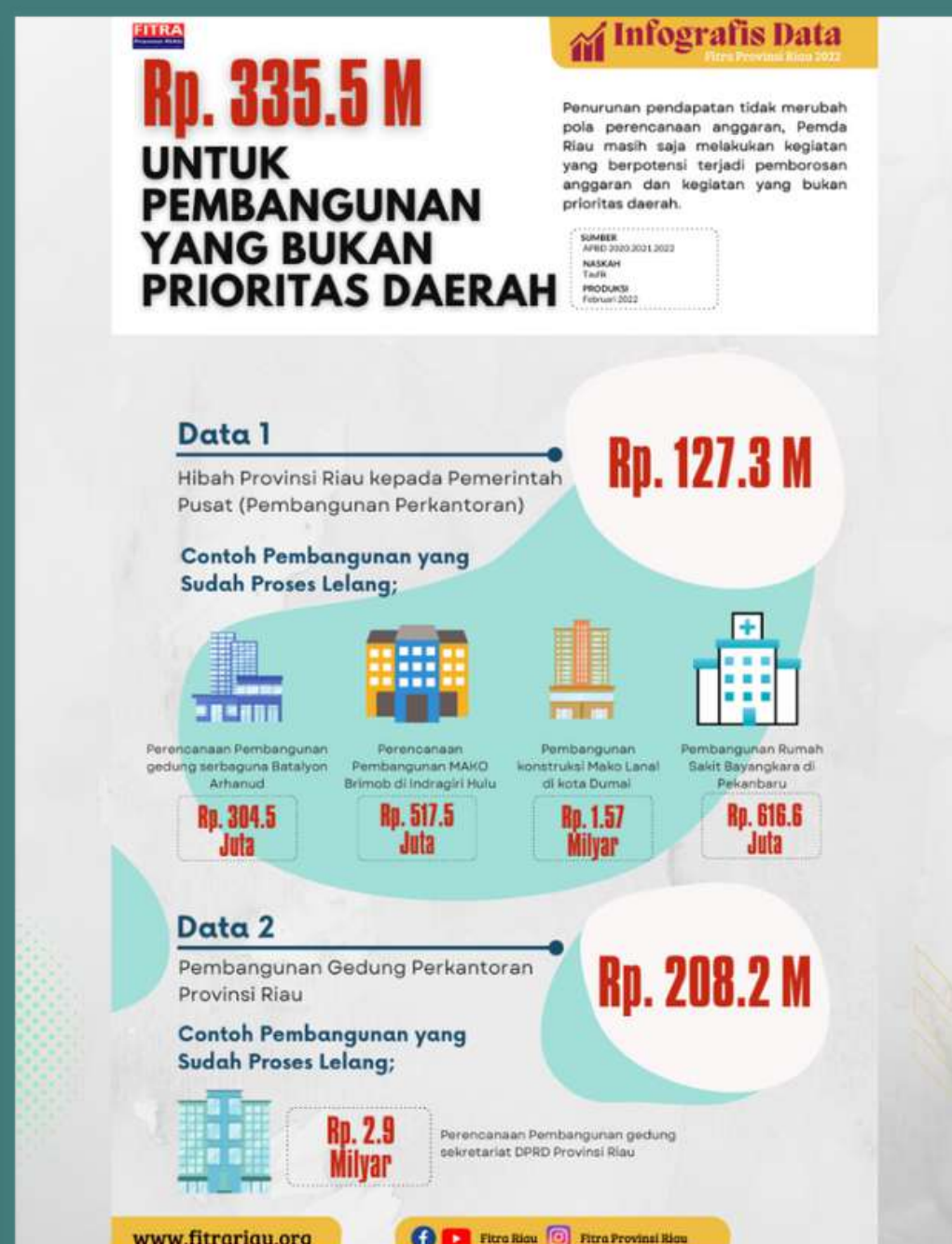
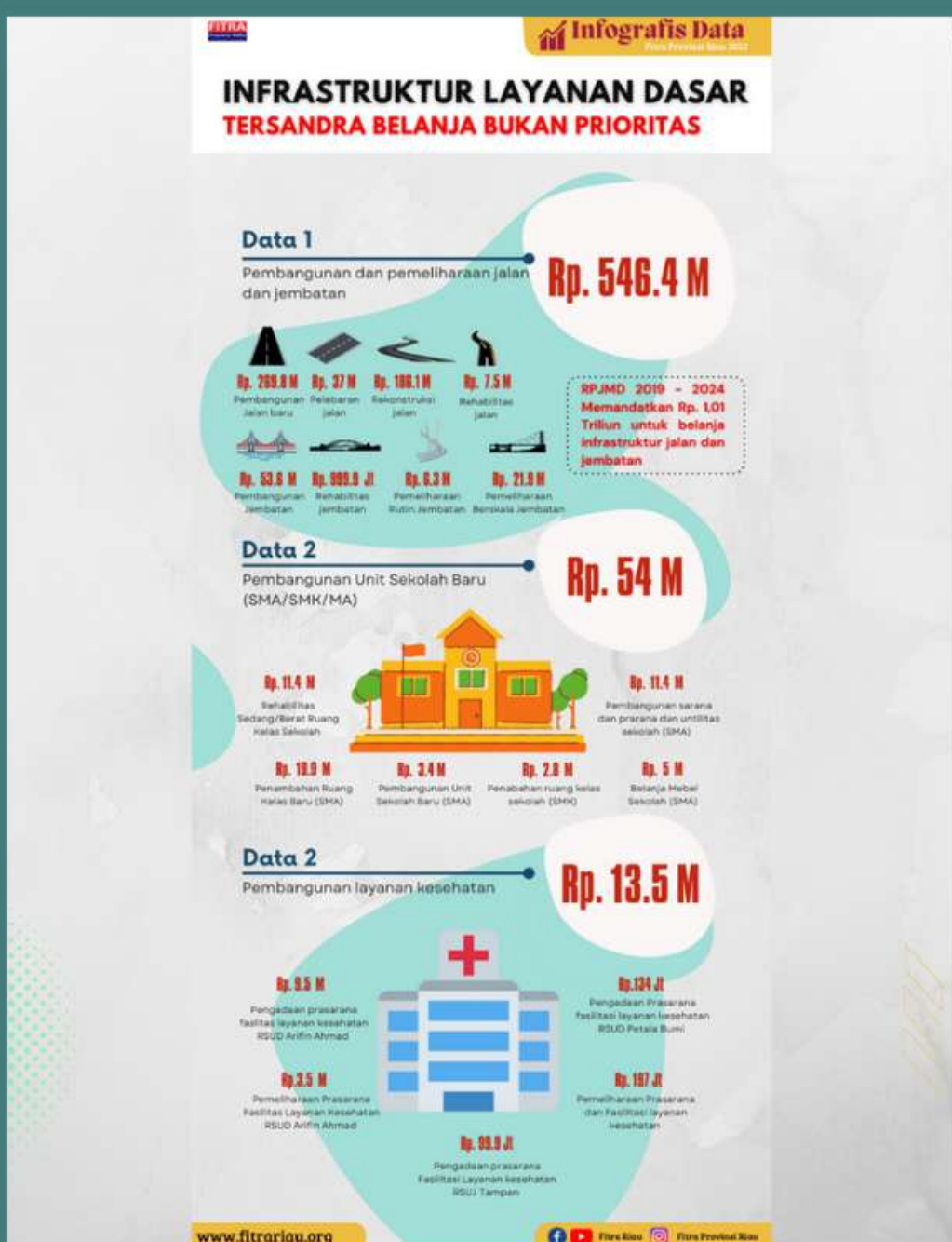
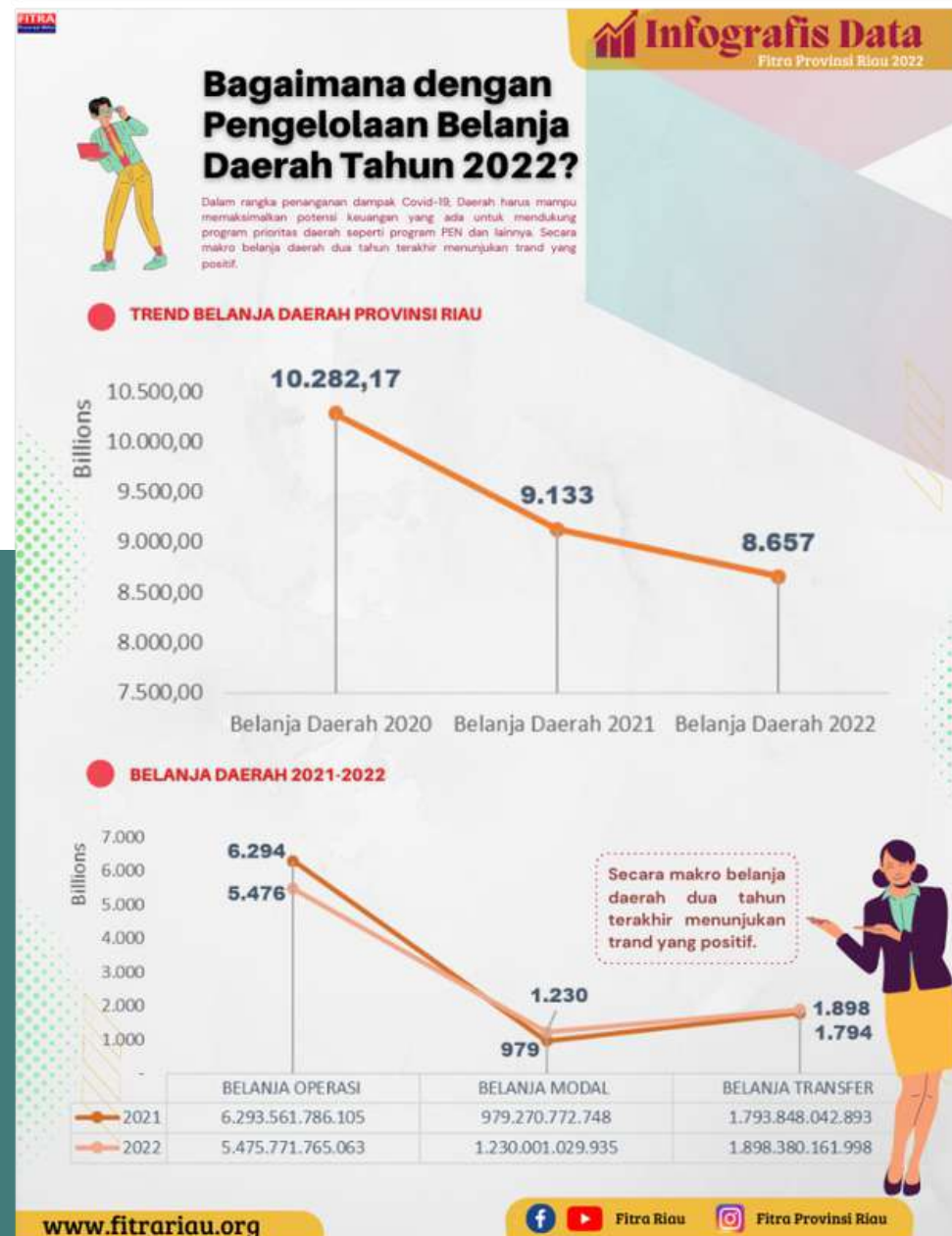
Editorial

Karena Mendagri, Gubernur Riau Cukup Bijak, walau Keliru dalam PLT-Kan Sekwan dan kadis.

Admin 2022-06-13



INFOGRAFIS



Konten Youtube FITRA RIAU sebagai Pusat Pengetahuan Anggaran



Gonjang-ganjing KPK, Ada apa dengan KPK?

72 x ditonton • 1 tahun yang lalu



BOROS BELANJA (Gubernur Riau, Harus Evaluasi Perubahan Belanja...

52 x ditonton • 1 tahun yang lalu



KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI RIAU

61 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Disharmonisasi Regulasi Dalam Perencanaan Pembangunan...

238 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Titik Finish Jalan Yan, Vonis Hakim Harus Maksimal.

58 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Menelusuri transparansi KPU (Bagaimana Layanan Transparansi...

100 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Provinsi Riau dalam Perspektif Gender???

52 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Mau Tau Potret Kinerja DPRD Provinsi Riau?

170 x ditonton • 1 tahun yang lalu



KISAH KISRUH BANK RIAU KEPRI?!

56 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Provinsi Riau Sudah Informatif, Benarkah???

64 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Setelah di TWK, Yudi Purnomo ngomongin soal korupsi di...

48 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Highlight Proses Launching TAKE Kab. Bengkalis

40 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Penilaian BEM UR untuk Kinerja GUBRI

315 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Mahasiswa "Harapan Masih Ada, untuk Gubri Berkinerja Baik"

78 x ditonton • 1 tahun yang lalu



**POLDA RIAU WELCOME!?!
Masyarakat Jangan Takut Melapor**

24 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Fitra Riau On Action 2022 "Riset & Advokasi Januari-Maret 2022"

21 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Fitra Riau On Action 2022 "BELA ANGGARAN Januari-Maret 2022"

15 x ditonton • 1 tahun yang lalu



Selama Jabatan Firdaus, Bagaimana Kebijakan (Sampah) di...

88 x ditonton • 11 bulan yang lalu



Andi Putra dalam Jeratan Korupsi Izin HGU, Bagaimana Proses dan...

95 x ditonton • 10 bulan yang lalu



DEWAN RIAU BELUM TRANSPARAN TERKAIT ANGGARAN KUNKER!!!...

125 x ditonton • 9 bulan yang lalu



TRANSPARANSI HGU SUDAHKAH TERBUKA!!! Apa Kata KI Riau???

200 x ditonton • 8 bulan yang lalu



Mini workshop "Pengembangan TAPE/TAKE di Riau"

46 x ditonton • 1 tahun yang lalu

FITRA RIAU dalam Media

Kamis, 02 Juni 2022

HOME NASIONAL ▾ DAERAH ▾ INTERNASIONAL POLITIK EKONOMI PERISTIWA PEMERINTAHAN LINGKUNGAN LAINNYA ▾

Breaking News Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19

MPR RI



Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik

Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan



YAMAHA
WR155R
THE REAL ADVENTURE PARTNER
Anggaran 60rb
Diskon Tenar 2bulan
Gratis Jersey ORIGINAL YAMAHA
Kunjungi Segera Dealer Resmi Yamaha Terdekat Di Kota Anda!

Home / Berita / Pemerintahan

Penunjukan Plt Sekwan dan Kadisdik Riau Fitra Riau Sebut Bagus secara Struktur Birokrasi, Tapi Etika Dipertanyakan

Polling



Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

A. Memuaskan
 B. Biasa Saja
 C. Kurang Memuaskan

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Syamsuar menunjuk Joni Irwan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Riau dan M Job Kurniawan sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau.

Hal itu dilakukan karena Muflihun yang sebelumnya menjabat sebagai Sekwan dan Kamsol sebagai Kadisdik Riau telah dilantik masing-masing sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar.

Keputusan ini terbilang langka atau tidak biasa karena merunut pada penunjukan Pj kepala daerah sebelum-sebelumnya, tetap bisa merangkap sebagai kepala dinas di Eselon II dan jabatan sebelumnya hanya di-Plh-kan. Hal ini tentu memancing kecurigaan banyak pihak, karena baik Kamsol maupun Muflihun bukan nama yang diusulkan Gubernur Riau ke Mendagri sebagai calon Pj Kepala Daerah.

Belakangan, BK DPRD Riau mempertanyakan penunjukan Plt Sekwan yang disebut tanpa koordinasi dengan fraksi - fraksi di DPRD Riau.

Manajer Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi anggaran (Fitra) Riau, Taufik mengatakan, dari acuan yang dipelajarinya, memang tidak dijelaskan secara rinci apakah menjadi persoalan gubernur mengambil langkah mem-Plt-kan kedua pejabat tersebut.

Namun, katanya, bicara analisa, secara tak langsung proses mem-Plt-kan Muflihun dan Kamsol, secara keabsahan itu telah menggugurkan mereka sebagai Pj. Karena syarat menjadi Pj kepala daerah adalah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kalau kita lihat posisi Pak Gubernur untuk menempatkan Plt itu, adalah sebuah terobosan yang baik untuk mencegah rangkap jabatan. Tapi apakah Pak Gubernur mem-Plt-kan ini untuk mencegah rangkap jabatan atau bentuk perlawanan, itu dari sisi lain," kata Taufik kepada **CAKAPLAH.com**.



Home / Pemerintahan

Bukti Bayar PBB Jadi Syarat Terima Gaji

Fitra Riau Minta Pemkab Pelalawan Tidak Menjeneralkan Sasaran Kebijakan

Redaksi

Rabu, 01 Juni 2022 18:58:25WIB

Cetak

Share Tweet Share G



PANGKALAN KERINCI (**PelalawanPos**) - Terkait kebijakan yang tengah diberlakukan oleh Pemkab Pelalawan melalui Surat Edaran (SE) Bupati yang mensyaratkan pembayaran gaji honorer dan tunjangan ASN dengan bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) banyak di keluhkan oleh abdi negara di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Keluhan ASN dan honorer Pemkab Pelalawan disebabkan kebijakan tersebut tidak menyentuh hak dan kewajiban mereka secara mendasar. Pegawai yang tidak memiliki kewajiban membayar PBB tetap dipaksa menunjukkan bukti bayarnya walaupun memakai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BPKAD Pelalawan atas nama orang lain.

"Saya dan istri sama sama bekerja di dinas, maka kami harus menunjukkan bukti bayar yang berbeda agar gaji dibayarkan bulan depan. Padahal kami cuma punya satu aset saja. Sebuah rumah, tidak ada aset lain. Karena kebijakan itu saya terpaksa membayar PBB kawan biar bisa melengkapi syarat terima gaji,"kata salah seorang pegawai di Pemkab Pelalawan yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (1/6/2022).

Fitra: Gubernur Riau Harus Batalkan Anggaran Lapangan Tenis Rp9,6 Miliar

Minggu, 12 Juni 2022 14:18 WIB

Bagikan Halaman Ini :



PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan, Pemprov Riau menganggarkan Rp9,6 miliar dari dana APBD untuk membangun tiga lapangan tenis.

Yakni, lapangan Tenis Kejaksaan Tinggi (Kejati) Rp 4,4 miliar, Lapangan Tenis Pengadilan Agama Rp1,9 miliar, dan Lapangan Tenis Tertutup Rp3,1 miliar.

Menurut Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, kebijakan alokasi anggaran untuk membangun lapangan tenis ini adalah bentuk perilaku pemerintah yang tidak tahu malu, memboroskan anggaran untuk belanja yang sama sekali bukan prioritas dan kebutuhan masyarakat Riau.

"Kebijakan alokasi anggaran ini, juga jauh dari upaya pemerintah Riau untuk membawa Riau lebih baik kedepan. Apa hubungan membangun lapangan tenis dengan misi Riau Lebih Baik?," kata Triono.

Justru, tambahnya, anggaran-anggaran semacam inilah yang menyandera kebutuhan prioritas masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara memadai.

"Alokasi anggaran ini mencerminkan tingkat sensitifitas pemerintah daerah terhadap masalah yang dihadapi warga sangat rendah. Warga sedang berupaya untuk pemulihan ekonominya akibat Covid-19, warga sedang berperang dengan harga bahan pokok yang tinggi, yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk ditangani. Tapi justru pemerintah tidak sensitif bahkan lebih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan yang pastinya bukan masyarakat kecil. Siapa yang akan olahraga itu? Tentu bukan warga kecil," kata Triono lagi.

Seberapa banyak fasilitas olahraga yang telah dibangun namun tidak difungsikan, kata Triono, bahkan sebagian telah rusak parah. Dan seberapa besar anggaran yang akan digunakan untuk pemeliharannya. Kenapa ini tidak menjadi dasar dalam merumuskan dan menetapkan anggaran.

Berita Riau

Dana Reboisasi Daerah Mengendap Rp200 M dan Belum Digunakan, Ternyata Ini Penyebabnya

Selasa, 21 Juni 2022 16:59

Penulis: [Nasuha Nasution](#) | Editor: [CandraDani](#)

lihat foto

f

t

w

in

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mencatat Rp200 miliar anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi atau disingkat DBH DR mengendap di 9 kabupaten dan kota serta provinsi yang belum digunakan.

Padahal anggaran dana bagi hasil dana reboisasi ini bisa digunakan daerah untuk reboisasi sumber daya alam, terutama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu, Fitra bersama 9 Kabupaten dan Kota menggelar group diskusi bersama terkait penggunaan dana DBH DR bersama 9 kabupaten dan kota se Riau, yang dihadiri Kemen-LHK, Kemenkeu dan Kemendagri melalui daring.



Jl. Kartama/Inpres Gg. Bambu No 5 Kel. Maharatu,
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru



(0761) 566833



Sekretariat.fitrariau@gmail.com



Fitra Riau



@fitraprovinsiriau

WWW.FITRARIAU.ORG